



**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
TAHAP KESIAPSIAGAAN BENCANA ALAM
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER
(Studi Kasus Bencana Banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo)**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD RENDY ABDULLAH

NIM 080910201046

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
TAHAP KESIAPSIAGAAN BENCANA ALAM
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER
(Studi Kasus Bencana Banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo)**

SKRIPSI

diajukan sebagai tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Progam Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

AHMAD RENDY ABDULLAH

NIM 080910201046

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas Karunia dan Hidayah-Nya juga Shalawat serta Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Karena atas segala kebesaran-Nya penulis dapat mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Wakiudin dan Ibunda tercinta Widiarti yang tak pernah lelah memberikanku limpahan kasih sayang dan tak pernah berhenti mendoakanku setiap waktu. Tiada kata-kata yang bisa melukiskan segala pengorbanan yang telah kau berikan selama ini untukku hingga aku bisa seperti saat ini. Engkau adalah Orang Tua yang sangat menghargai sebuah perjuangan. Terima kasih yang tiada terkira untukmu.
2. Kakak'ku Eka Sandra Ningtias, Sangat kecil dorongan dari anda, tapi bagi saya anda adalah orang yang berani, secara tidak langsung itulah Doktrin bagi diri saya. Terima kasih karena telah memberikan warna dalam hidup saya.
3. Rumah ke-2ku MPA. MAPALUS terima kasih. Karena engkaulah, saya mengerti. Bukan "Gotong Royong" yang kau berikan, melainkan LEBIH DARIPADA ITU
4. Sobat-sobatku "*d'Jan**kz*" kau bukan siapa siapa sebelumnya. Tapi sekarang, kau siapa-siapa bagi saya.
5. Buat yang bernama Noor Qomariyah Agustin, hanya sedikit pergorbanan anda bagi saya. Tapi otak kecil saya sudah terselipkan segala bentuk hal yang membuat kehidupan saya menjadi seimbang.

MOTTO

“kalah tak berarti takluk, mundur tak berarti menyerah ”

(A. Rendy Abdullah)

“nothing great can be achieved without enthusiasm”

(Ralph Waldo Emerson)¹

¹ Norman Vincent Peale, *Berfikir Positif Setiap Hari*, Interaksara, 3

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Ahmad Rendy Abdullah

NIM : 080910201046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul; **Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahap Kesiapsiagaan Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Jember.** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan ke instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang arus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 September 2015

Yang menyatakan,

Ahmad Rendy Abdullah

NIM 080910201046

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM TAHAP KESIAPSIAGAAN BENCANA ALAM
DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER**

(Studi Kasus Bencana Banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo)

Oleh

AHMAD RENDY ABDULLAH

NIM 080910201046

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Suji, S.Sos, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Tahap Kesiapsiagaan Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Jember (Studi Kasus Bencana Banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo)” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada:

Hari, tanggal : Jum’at, 4 September 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji,

Ketua Penguji

Sekretaris

Drs. Supranoto, M.Si

NIP. 196102131988021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

NIP. 195805101987022001

Anggota Penguji,

1. Drs. Agus Suharsono, M.Si

NIP. 196308141989031023

(.....)

2. Drs. Anwar, M.Si

NIP. 196306061988021001

(.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Tahap Kesiapsiagaan Bencana Alam Di wilayah Kabupaten Jember (Studi Kasus Bencana Banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo)”; Ahmad Rendy Abdullah, 080910201046; 2015: 88 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Alam, dengan studi kasus bencana banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo. Badan Penanggulangan bencana daerah merupakan Lembaga/Dinas/Instansi yang bergerak dalam kebencanaan yang wajib melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Tahap Kesiapsiagaan menjadi konsen dalam penelitian ini. Namun dalam penerapannya peran BPBD masih terdapat masalah saat menjalankan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana dimana masih menitik beratkan pada gawat darurat saja, skala prioritas menjadi faktor utama dalam penanganannya.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data Primer didapat dengan melakukan wawancara secara mendalam (*Indepth Interview*) sedangkan data sekunder diperoleh melalui metode studi kepustakaan yaitu data-data yang dikumpulkan bersumber dari akar permasalahan yang hendak diteliti. Sedangkan untuk informan dipilih dengan menggunakan metode *purposive* yang telah disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya. Informan dalam penelitian harus menguasai dan terlibat secara mendalam dalam hal Tahap Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang menjadi kajian penelitian tersebut.

Selanjutnya uji validitas data dilakukan dengan metode triangulasi berdasarkan sumber.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam Peran BPBD pada tahap kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dilakukan melihat Rencon (Rencana Cotijensi), yang dimana masih menggunakan skala prioritas pada proses penanganannya. Hal ini dapat dilihat pada awal berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada akhir tahun 2012 sampai akhir 2014 belum adanya Kajian Tentang Pengurangan Resiko bencana banjir yang ada di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo. Padahal banjir yang terjadi di Desa Wonoasri pada penyelenggaraan penanggulangan bencana proses pra-bencana Desa Wonoasri termasuk situasi terdapat potensi bencana.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis skripsi dengan judul. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:.

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;.
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Suji S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang bersedia membimbing penulis selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk hadir dalam ujian skripsi penulis.

7. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara yang telah banyak membantu.
8. Bapak Heru Widagdo selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember yang telah banyak memberikan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember yang bersedia memberikan bantuan kepada penulis guna kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Bapak Sugeng Priyadi selaku Kepala Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini. Anda orang baru kehidupan saya, tapi bagi saya tidak ada baru bagi penjuang seperti anda.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu guna kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima Kasih.

Jember, 4 September 2015

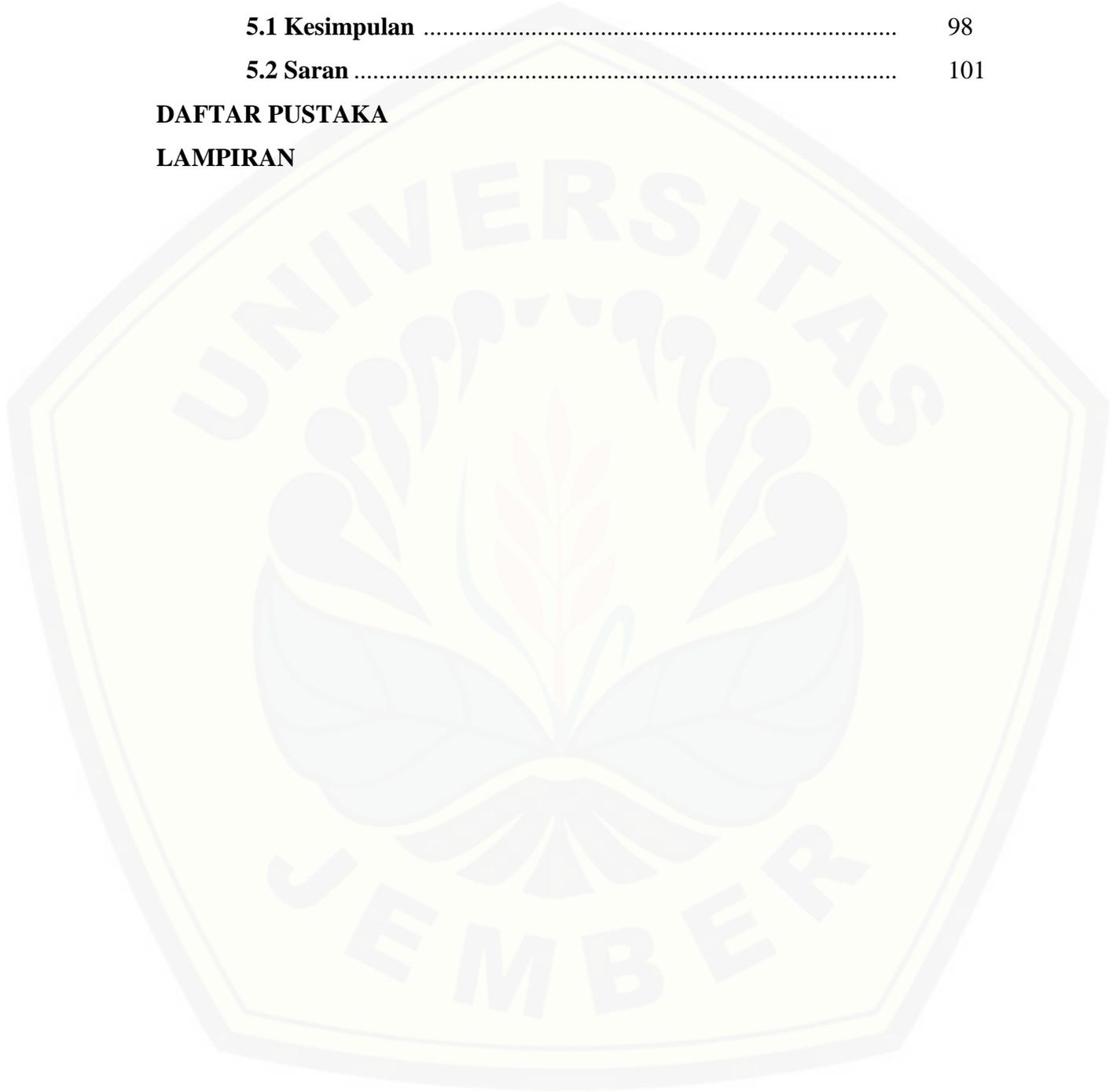
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Administrasi Negara	18
2.1.1 Perspektif Administrasi Negara Dalam Bencana.....	20
2.2 Konsep Organisasi	23
2.2.1 Pengertian Organisasi	23
2.2.2 Prinsip Dan Asas Organisasi.....	24
2.2.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27

2.3 Konsep Peran	29
2.3.1 Pengertian Peran	29
2.3.2 Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana	30
2.4 Menejemen Bencana	36
2.4.1 Bencana.....	36
2.4.2 Kesiapsiagaan	38
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Fokus Penelitian	42
3.3 Lokasi Penelitian.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Penentuan Informan.....	45
3.6 Metode Pemeriksaan Keabsahan Data	46
3.7 Teknik Analisis Data.....	47
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo	50
4.1.1 Aspek Geografi	50
4.1.2 Aspek Demografi	51
4.1.3 Aspek Pemerintahan	52
4.1.4 Aspek Sosial	54
4.2 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Termasuk Daerah Rawan Bencana.....	55
4.3 Gambaran Umum Bpbd Kabupaten Jember.....	58
4.4 Hasil Pembahasan Tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember	65
4.5 Pembahasan Umum Bencana Banjir Desa Wonoasri ...	88

BAB 5. PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Manajemen Bencana	37
2.2 Siklus Manajemen Bencana	37
2.3 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	38
3.1 Komponen analisis data: Model Interaktif	48
4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Wonoasri	53
4.2 Peta Rawan Bencana Kecamatan Tempurejo	56
4.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Jember	61
4.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jember	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penilaian Bahaya.....	7
1.2 Data Kawasan Rawan Banjir Bandang	9
1.3 Data Kawasasn Rawan Banjir Genangan.....	9
1.4 Data Kejadian Banjir Di Jember Tahun 2012-2014.....	10
4.1 Jumlah Pendduduk Berdasarkan Usia.....	51
4.2 Nama Pejabat Pemerintah Dea Wonoasri	53
4.3 Bentuk Kegiatan Penilain Resiko	75
4.4 Bentuk Kegiatan Perencanaan Siaga.....	77
4.5 Bentuk Kegiatan Mobilisasi Sumber Daya	79
4.6 Bentuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan	81
4.7 Bentuk Kegiatan Koordinasi	82
4.8 Bentuk Kegiatan Mekanisme Respon	83
4.9 Bentuk Kegiatan Peringatan Dini.....	85
4.10 Bentuk Kegiatan Gladi.....	88

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua besar dan dua samudera yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Indonesia juga berada di atas lempeng benua yang masih aktif, dengan barisan gunung api yang masih aktif (*ring of fire*) sehingga Indonesia sering sekali disapa dengan negara yang sangat akrab dengan bencana. Kondisi geografis Negara Indonesia itulah yang merupakan faktor penyebab kerentanan Indonesia terhadap bencana.

Bencana merupakan sesuatu yang sering diidentikkan dengan kejadian buruk oleh masyarakat. Bencana atau sering disebut dengan "*disaster*" dalam bahasa Inggris merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dalam sejarah kehidupan manusia.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Undang-undang No. 24 tahun 2007, bencana diklasifikasikan atas 3 jenis sebagai berikut.

1. Bencana alam

Yaitu bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, meteor, pemanasan global, topan dan tsunami.

2. Bencana non alam

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Tumbuhnya kesadaran akan perlunya upaya preventif dalam penanggulangan bencana hampir dapat dipastikan tumbuh setelah melalui pengalaman kejadian bencana yang terus menerus atau bencana dalam skala yang lebih besar. Indonesia memiliki kebangkitan kesadaran bersama akan perlunya sistem penanggulangan bencana yang komprehensif setelah kejadian bencana tsunami Aceh dan Nias tanggal 26 Desember 2004. Dua tahun setelah kejadian bencana tersebut, Indonesia mengesahkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. Undang-undang No. 24/2007 yang disusun atas inisiatif DPR dengan didukung seluruh *stakeholder* kebencanaan di Indonesia, merupakan bentuk kebijakan dan komitmen bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lebih baik. Beberapa kelemahan pokok yang diamanatkan untuk ditingkatkan adalah perlunya peraturan-peraturan yang operasional (regulasi), kelembagaan yang kuat, perencanaan dan pendanaan yang memadai. Disamping itu penyelenggaraan penanggulangan bencana juga berbasis pada paradigma pengurangan resiko bencana yang ditunjang oleh penyelenggara PB yang ahli dan profesional. Untuk itu diperlukan program-program pembangunan dan pengembangan kapasitas di semua tingkatan.

Sangat disadari, konsep penanggulangan dimasa lalu, dimana penanggulangan bencana lebih baik bersifat respon sehingga diperlukan tindakan cepat yang sentralistik, ternyata tidak mampu menunjukkan hasil yang

memuaskan. Bahkan lebih banyak menuai kecaman dan ketidakpuasan dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana pada saat respon, dinilai lambat, kurang terkoordinasi dan tidak terencana dengan baik. Persiapan-persiapan untuk menunjang operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif harus telah disiapkan sebelumnya dalam bentuk SOP, rencana kedaruratan atau kontinjensi, sumber daya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwasannya Tugas/Tujuan Negara antara lain adalah *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”*. Hal-hal mengenai perlindungan rakyat yang menunjukkan perwujudan dari kewajiban pemerintah dalam melindungi rakyat sebagai bagian dari hak asasi rakyat sehingga penanganan terhadap bencana merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat dari resiko bencana.

Undang-undang telah mengamanatkan bencana merupakan urusan bersama dan harus ditangani secara bersama-sama antara unsur pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat. Pemerintah bukan aktor satu-satunya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah bertindak sebagai penanggungjawab utama, fasilitator dan *regulator*. Di mana dalam penetapan setiap kebijakan haruslah melalui partisipasi atau peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai sebuah regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif, UU No. 24/2007 masih tergolong baru dan perlu disosialisasikan secara insentif. Sebagai implementasi awal yang mendapatkan pujian dari kalangan baik di dalam maupun di luar negeri adalah perkuatan kelembagaan. Pada tingkat pusat telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sesuai dengan permendagri No. 46/2008 diamanatkan bahwa setiap provinsi wajib membentuk

BNPB sedangkan kabupaten/kota “dapat” membentuk BPBD. Sedangkan dalam UU No. 24/2007 untuk masalah ini hanya disebutkan pada pasal 5 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan bencana dan pasal 10 ayat (1) Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pasal 18 ayat (1) Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui peraturan daerah (Perda).

Sedangkan di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengertian Badan Penanggulangan Bencana adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana.

Mengelolah bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara dadakan atau insidental, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi. Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Menurut Ramli (2010:27), penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana (pra-bencana), tanggap darurat dan rehabilitasi (pasca bencana).

Menurut Ramli (2010:31), secara umum kegiatan Manajemen Bencana dapat dibagi menjadi tiga tahapan (setiap tahap terdiri dari beberapa kegiatan penanggulangan bencana). Adapun tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap Pra-Bencana

Pada tahap Pra-Bencana terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

- a. Mitigasi Bencana (*disaster mitigation*);
- b. Kesiapsiagaan (*preparedness*);
- c. Peringatan Dini (*early warning system*).

2. Tahap Saat Bencana

Pada Tahap Saat Bencana terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

- a. Tanggap Darurat (*emergency response*).

3. Tahap Pasca-Bencana

Pada tahap ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

- a. Rehabilitasi (*rehabilitation*);
- b. Rekonstruksi (*reconstruction*).

Dalam penelitian yang akan penulis bahas adalah pada Tahap Pra-Bencana khususnya pada Tahap Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dalam UU 24/2007 dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kesiapsiagaan itu sendiri berarti mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana. Mampu mencegah bencana, jika mungkin. Jika tidak, mampu mengurangi dampaknya. Jika ada bencana, dapat menanggulangi secara efektif. Setelah bencana terjadi, mampu pulih kembali.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk rawan bencana. Berbagai ancaman seperti erupsi, gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan tanah longsor, gelombang tinggi, angin puting beliung, kegagalan teknologi maupun kerusakan sosial. Daerah rawan banjir dan kekeringan berada di sepanjang pantai utara dan pantai selatan Jawa diantaranya Jember, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban. Daerah rawan bencana gunung berapi yang termasuk aktif diantaranya gunung Semeru (di Lumajang), gunung Kelud (Kediri), gunung

Arjuno dan Welirang (di Malang), gunung Bromo (di Probolinggo), Raung (Bondowoso, Jember, Banyuwangi), gunung Ijen (Banyuwangi) gunung Lemongan (di Lumajang).

Bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alam yaitu peristiwa fisik seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gempa bumi dan juga karena aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibatnya kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural bahkan sampai kematian. Kerugian timbul tergantung pada kemampuan untuk mencegah dan menghindari bencana dan bagaimana juga tentang daya tahan mereka.

Pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi (*hazard*) serta memiliki kerentanan atau kerawanan (*vulnerability*) yang juga tinggi tidak akan memberi dampak yang hebat atau luas jika manusia yang berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana (*disaster reliance*). Konsep ketahanan bencana merupakan evaluasi kemampuan sistem dan infrastruktur-infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah dan menangani tantangan-tantangan serius yang hadir.

Kabupaten Jember salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang mempunyai daerah dengan kemiringan wilayah tinggi. Kabupaten Jember sendiri terdiri dari 31 kecamatan dan 201 dusun, dengan jumlah penduduk 2.529.967 jiwa yang di dalamnya hampir separuh kecamatan merupakan daerah rawan bencana. Sebanyak 17 dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember merupakan daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan tsunami. Adapun kecamatan yang rawan banjir di antaranya Kecamatan Ledokombo, Mumbulsari, Tempurejo, Wuluhan, Tanggul dan Balung. Kecamatan rawan longsor antara lain Kecamatan Jelbuk, Arjasa, Sumberjambe, Silo, Mayang, Panti, Mumbulsari, dan Sumberbaru. Kecamatan Sumberjambe, Ledokobo dan silo masuk pada daerah rawan bencana Gunung Berapi. Sedangkan titik rawan tsunami adalah kawasan Pantai Bandalit di Kecamatan Tempurejo, Pantai Watu Ulo dan Mayangan desa sumberejo Kecamatan Ambulu, serta Pantai Puger di Kecamatan Puger. Secara

Geografis Kabupaten Jember terletak di wilayah bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur tepatnya pada posisi 7.059'6'' sampai 8.033'56'' Lintang Selatan dan 113.016'28'' sampai 114.003'42'' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowonso dan Kabupaten Probolinggo disebelah utara, Kabupaten Lumajang disebelah barat, Kabupaten Banyuwangi disebelah Timur, dan disebelah selatan dibatasi Samudra Hindia. Kabupaten Jember berada dalam ketinggian 0-3.300 meter diatas permukaan laut. Sebagai besar wilayah ini pada ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut (37.75 %), selebihnya 19.95 % pada ketinggian 0 – 25 meter, 20.70 % pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15.80 % berada dalam ketinggian 500 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut dan 7.80 % berada pada ketinggian lebih dari 1.000 mdpl. Berikut ini adalah penilai bahaya menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Penilaian Bahaya

Jenis Ancaman	Probalilitas	Dampak
Gunung Berapi	1	3
Gempa Bumi	1	4
Tsunami	1	5
Banjir (Bandang – Genangan)	7	5
Longsor (Gerakan Tanah)	5	1
Kekeringan	4	4

Sumber: Data Potensi Rawan BPBD Kabupaten Jember

Dari data diatas, bencana yang sering terjadi di Kabupaten Jember adalah banjir, baik itu banjir bandang maupun banjir genangan, karena memang dorongan faktor keadaan wilayah curah hujan yang tinggi dan sebagaian mempunyai kemiringan tanah yang drastis pada daerah dataran tinggi bagian hulu, dan kemiringan tanah pada daerah berombak bagian hilir. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat, mereka masih menggunakan lahan miring untuk area perkebunan yang menyebabkan tanah menjadi gembur daya tahan

penampung resapan air tidak ada lagi, hal ini menyebabkan timbulnya tanah longsor dan banjir bandang di daratan tinggi pada musim penghujan. Seharusnya lahan seperti itu ditanami pohon tahunan ataupun tanaman keras, sebagai contoh adalah pinus, cemara dan lain sebagainya. Pada daerah hilir sendiri yang sering terjadi karena akibat tidak muatnya daya tampung akan debit air dari hulu, yang pada dasarnya di daerah hilir terjadi penyempitan lahan aliran sungai yang akibatnya timbulnya genangan air. Sebenarnya pemerintah daerah sendiri telah banyak melakukan sosialisasi mengenai kerawanan bencana banjir pada lahan miring dan permukiman penduduk di lereng bukit maupun di daerah hilir yang disebabkan oleh penyempitan lahan tingginya ombak.

Banjir di Kabupaten Jember didominasi oleh Lahan dengan kondisi topografi berbukit dengan kemiringan 31-50% seluas 722.73 km (52%), bergelombang dengan kemiringan 11-30% seluas 333.57 km (24%).

Sisanya merupakan daerah bergunung dengan kemiringan lahan lebih dari 51% (10%), daerah berombak dengan kemiringan lahan 6-10% seluas 138.99 km² (10%) dan daerah daratan dengan kemiringan 0-5% seluas 55.59 km² (4%).

Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Jember dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Curah hujan yang tinggi;
2. Kemiringan tanah yang mengakibatkan tanah longsor;
3. Letak geografis berada didataran tinggi dan gelombang tinggi di bagian selatan;
4. Berkurangnya tanaman keras karena penebangan liar di sekitar hutan;
5. Penggalian pasir dan batu.

(Sumber : Data Potensi Rawan BPBD Kabupaten Jember)

Wilayah dengan topografi diatas sangat besar pengaruhnya terhadap fenomena alam dan dampaknya terhadap kejadian Banjir Bandang dan Banjir Genangan didaerah hulu dan hilir sebanyak 12 Kecamatan.

Tabel 1.2 Data Kawasan Rawan Banjir Bandang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Jiwa
1	Patrang	Kelurahan Slawu	6.162
2	Panti	Kemuningsari Lor	6.351
		Kemiri	8.440
		Suci	1.078
		Pakis	6.775
		Serut	11.798
3	SumberBaru	Yosorati	16.568
		Gelang	14.479
4	Silo	Karangharjo	11.170
		Harjomulyo	9.662
		Pace	16.930
		Mulyorejo	13.666

Sumber: Data Potensi Rawan BPBD Kabupaten Jember

Tabel 1.3 Data kawasan Rawan Banjir Genangan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Jiwa
1	Tempurejo	Tempurejo	10.708
		Sidodadi	10.135
		Wonoasri	9.300
		Curahnongko	6.186
		Curahtakir	10.879
2	Kencong	Cakru	10.385
		Paseban	7.051
		Kraton	9.384
3	Gumukmas	Mayangan	10.280
		Kepanjen	10.204
4	Balung	Balunglor	22.755
5	Rambipuji	Rambigundam	8.379
		Nogosari	18.826
6	Wuluhan	Lojejer	19.275
7	Sumberbaru	Sumberagung	9.887
		Rowo Tengah	9.622
8	Tanggul	Tanggul Wetan	15.954

Klatakan

8.656

Sumber: Data Potensi Rawan BPBD Kabupaten Jember

Tabel 1.4 Data Kejadian Banjir Di Jember Tahun 2012 – 2014

No	Tanggal	Tempat Kejadian	Akibat yang ditimbulkan
1	01 Januari 2012	Kecamatan Silo	Banjir Bandang merusak desa jalinan dan desa harjomulyo total 32 kk dan 100 jiwa, kerugian ditaksir Rp. 280.000.000
2	05 Januari 2012	Kecamatan Tempurejo	Banjir Genangan berakibat di desa Kraton, Curahlele, wonoasri total 425 kk dan 1275 jiwa mengungsi.
3	20 Januari 2012	Kecamatan Gumukmas	Banjir Genangan berakibat di desa bendorejo dan desa karangrejo total 50 kk dan 200 jiwa serta 2 hektar lahan, kerugian ditaksir Rp. 58.500.000
4	08 Maret 2012	Kecamatan Tempurejo	Banjir Genangan berakibat di desa Kraton, Curahlele, wonoasri total 1301 kk dan 3500 jiwa kerugian di taksir Rp. 200.000.000
5	08 Maret 2012	Kecamatan Gumukmas	Banjir Genangan berakibat di desa Krajan dan Purwoasri total 150 kk dan 450 jiwa kerugiannya mencapai Rp. 20.000.000
6	22 April 2012	Kecamatan Sumberbaru	Banjir Genangan terjadi karena luapan sungai pada desa Krajan dan desa kali Glagah dengan total 1 kk dan 4 jiwa 1 meninggal.
7	08 Januari 2013	Kecamatan Tempurejo	Banjir Genangan terjadi di Desa Wonoasri, Dusun Curahlele dan Dusun Kraton Merendam Pemukiman penduduk ketinggian air 30 Cm-40 Cm Rumah terendam air Desa Wonoasi Dusun Curahlele 655 KK Dusun Kraton 634 KK Sawah/lahan pertanian 80 hektar Rumah terendam air Desa Sanenrejo Dusun Mandilis 6 Rumah Dusun krajan 10 Rumah Sawah/lahan pertanian 25,5 Hektar Kerugian kuranglebih Rp. 1.100.000.000
8	10 Januari 2013	Kecamatan Wuluhan	Gelombang laut tinggi lebih kurang 6 meter di pantai watu ulo Payangan Air naik ke daratan setinggi 4 meter rendam persawahan dan pemukiman. Merusak badan jalan. Muara sungai mengalami pendangkalan.
9	17 Januari	Kecamatan Wuluhan	Banjir akibat hujan deras terus menerus terjadi di Desa Dukuhdempok, Dusun

	2013		Wuluhan,DesaGlundengan,DusunKrajan,DesaTanjungrejo,Dusun Karangsono, Merendam Perumahan Penduduk ketinggian air 30 Cm - 40 Cm sebanyak 59rumahSawah terendam air6 Hektar. Kerugian kurang lebihRp. 100.000.000.
10	30 Januari 2013	Kecamatan Tempurejo	Banjir disebabkan hujan deras yang terjadi di Desa Wonoasri, Dusun CurahleleJembatan penghubung Sungai Curahlele ambrol panjang 7 meter dan lebar 4 meter Mengakibatkan arus lalulintas penduduk dusun curahlele tidak bisa normal Jembatan penghubung Sungai Curahlele ambrol panjang 7 meter dan lebar 4 meter Mengakibatkan arus lalulintas penduduk dusun curahlele tidak bisa normalKerugian kurang lebihRp. 50.000.000,00
11	18 April 2013	Kecamatan Gumukmas	Banjir yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul sungai yang tidak mampu menahan debit air di Desa Kepanjen 120 KK terkena dampak bencana banjir
12	18 April 2013	Kecamatan Kencong	Banjir yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul sungai yang tidak mampu menahan debit air di Desa keraton dan Paseban Desa kraton sebanyak 269 KK terkena dampak Desa Paseban sebanyak 47 KK terkena dampak Areal pertanian desa Keraton yang terkena banjir 15 Ha Areal pertanian desa paseban yang terkena banjir 5 Ha Tanaman tebu 2 Ha Kolam mengalami kerugian sekitar 30.000.000
13	23 Mei 2013	Kecamatan Ledokombo	Banjir yang diakibatkan oleh hujan yang turun sangat deras di Desa Lembengan 1 rumah permanen milik warga atas nama MISNADIN di RT 02 RW 01 Dusun Krajan mengalami rusak berat Kerugian diperkirakan sekitar 20.000.000
14	23 Mei 2013	Kecamatan Ledokombo	Banjir yang diakibatkan oleh hujan yang turun sangat deras di Desa Lembengan 1 rumah permanen milik warga atas nama MISNADIN di RT 02 RW 01 Dusun Krajan mengalami rusak berat Kerugian diperkirakan sekitar 20.000.000
15	04 Januari 2014	Kecamatan Mumbulsari	Banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi di DesaMumbulsariGenangan banjir dengan ketinggian 20-60cm di areal sawah sekitar Dam seluas sekitar10 Ha

16	.23 Januari 2014	Kecamatan Wuluhan	Banjir dengan ketinggian air 20 – 80 cm yang diakibatkan oleh hujan yang terus menerus. Desa Dukuhdempok, Desa Lojejer, Desa Ampel Korban terdampak bencana banjir di Desa Dukuhdempok sebanyak 300 KK. Korban terdampak bencana banjir di Desa Lojejer sebanyak 275 KK. Korban terdampak bencana banjir di Desa Ampel sebanyak 150 KK
17	23 Januari 2014	Kecamatan Ambulu	Banjir dengan ketinggian air 60 – 100 cm yang diakibatkan oleh hujan yang terus menerus. Desa Sumberejo. Korban terdampak bencana banjir di Desa Sumberejo sebanyak 250 KK
18	24 Januari 2014	Kecamatan Puger	Banjir menggenangi rumah warga areal persawahan dengan ketinggian air 50 – 100 cm yang diakibatkan oleh hujan yang terus menerus di Desa Grenden. Di Dusun Krajan I rumah sebanyak 32 unit dan sawah seluas 31 Ha terendam banjir. Di Dusun Krajan II rumah sebanyak 23 rumah penduduk terendam banjir. Di Dusun Karetan rumah penduduk sebanyak 42 rumah dan sawah seluas 5 Ha terendam banjir
19	25 Januari 2014	Kecamatan Puger	Banjir dikarenakan curah hujan yg cukup tinggi sehingga sungai tidak bisa menampung debit air. Desa Puger Wetan , Grenden, Kasian Timur, Wringin Telu, Mlokorejo Bagorejo. Sebanyak 5 desa di Kecamatan Puger dan Gumuk Mas tergenang banjir
20	20 Februari 2014	Kecamatan Sumberbaru	Banjir diakibatkan hujan deras. Dsn Krajan dan Dsn Pasirian Desa Kaliglagah 1 (satu) jembatan runtuh
21	06 Desember 2014	Kecamatan Tempurejo	Hujan terus menerus yang mengakibatkan meluapnya air sungai 20 rumah terendam air setinggi lutut orang dewasa dan 30 Hektar sawah. Diperkirakan mencapai ± Rp 45.000.000
22	27 Desember 2014	Kecamatan Semboro	Hujan lebat mengakibatkan meluapnya air dari sungai bondoyudo dan tanggul. Dusun Pondok rampal, desa pondok joyo, dan desa Sidomulyo. Ketinggian air sungai di Pondok joyo 40-80 cm. Ketinggian air sungai di Sidomulyo 40-80 cm. Tergenangnya rumah warga di pondok joyo sebanyak 487 KK, di desa Sidomulyo sebanyak 66

KK.			
23	27	Kecamatan Desember 2014	Kecamatan Kencong Hujan deras mengakibatkan meluapnya air sungai ke pemukiman warga Desa Paseban Tergenangnya rumah warga sebanyak 10 KK
24	29	Kecamatan Desember 2014	Kecamatan Panti Curah hujan tinggi mengakibatkan longsor didaerah pegunungan sentul panti Desa Suci ± 70 Ph mahoni & ± 1.297 Ph karet hanyut tertimbun lumpur.

Sumber: Data Potensi Rawan BPBD Kabupaten Jember

Dari data di atas sepanjang tahun 2012 – 2014 kejadian banjir di Kabupaten Jember menunjukan bahwa Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo sebagai bahan studi kasus penelitian ini. Yang dimana Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo dalam setiap tahun mulai dari 2012 – 2014 terjadi bencana banjir dengan frekuensi 5 kali. Banjir disebabkan oleh bertemunya antara dua sungai yaitu sungai sanen dan sungai mayang yang mengakibatkan penyumbatan beberapa saluran DAS. Jadi daerah aliran sungai endapannya luar biasa. Yang ketiga, wonoasari itu memang aliran dari 3 desa, selain andongrejo yang tadi menjadi hutan gundul dan curahnongko dari bagian selatan, kalau wilayah utara itu kali sanen yang lurus dengan mbaba. Dampaknya ketika endapan itu sudah penuh itu akan membanjiri atau meluber ke desa wonoasri. Banjir genangan di Kecamatan ini berdampak paling tinggi korban jiwa dan dengan rata-rata 60 cm – 100 cm ketinggian air.

Selain kondisi alam yang rawan, ada beberapa permasalahan yang lain yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan Bencana di Kabupaten Jember yaitu:

- a. Penanggulangan bencana masih menitik beratkan pada kegiatan gawat darurat saja;
- b. Masih bertumpu pada peran dan kemampuan pemerintah daerah;
- c. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/ instansi Pemerintah Pusat antara lain Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha

swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan tinggi. Organisasi kemasyarakatan, Media massa, dan masyarakat.

(Sumber: Data Potensi Rawan BPBD Kabupaten Jember)

Secara garis besar permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah:

- a. Penanganan Bencana masih bersifat persial;
- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan Bencana;
- c. Kurangnya sarana prasarana pendukung dalam kegiatan kedaruratan;
- d. Kurangnya anggaran penanggulangan dalam Bencana;
- e. Belum merupakan gerakan masyarakat dalam penanganan Bencana.

Sumber: Data Potensi Rawan BPBD Kabupaten Jember

Secara legal formal sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian/definisi bencana disebutkan: bencana adalah serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam dan atau manusia yang manusia yang dapat mengakibatkan jauhnya korban jiwa dan harta benda, kerusakan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, fasilitas umum serta mengganggu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sehingga sebelum bencana itu terjadi, akan lebih baik apabila mengetahui apa bagaimana, mengapa dan dimana bencana itu bisa terjadi. Jadi masyarakat akan mengetahui tindakan apa yang akan diambil saat terjadinya bencana, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana.

Disebutkan dalam jurnal internasional oleh Kelman, mengungkapkan bahwa:

“in reality, disasters have rarely yielded durable conflict resolution. Instead, unsurprisingly, the memory of assistance and humanitarianism fades away while petty-politics-asusual dominates. Yet interest in the idea of “ disaster diplomacy “ continues to build (see www.disasterrelated.org). A growing body of research is examining how and why disasterrelated activities do and do not induce cooperation among enemies. The key phrase here is “ disaster-

related activities, “ including those that take place before a disaster strikes (such as prevention, mitigation, and preparedness) as well as afterward (including response and recovery).”

Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

Pada kenyataannya, bencana jarang menghasilkan resolusi konflik tahan lama. Sebaliknya, mengejutkan, memori dan bantuan kemanusiaan memudar sementara kecil-politik-asusual mendominasi. Namun minat gagasan “diplomasi bencana“ terus membangun (lihat www.disasterrelated.org). Sebuah pertumbuhan badan penelitian yang meneliti bagaimana dan mengapa disasterrelated kegiatan melakukan dan menyebabkan kerjasama antara musuh. Kunci flse disini adalah “ kegiatan yang berhubungan dengan bencana, “termasuk yang terjadi sebelum bencana terjadi (seperti pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan) serta sesudahnya (termasuk respon dan pemulihan). (*journal : I. 2007.p.6*)

Penelitian tentang bencana bermanfaat bagi petugas, agar mereka dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengatur sumber daya mereka sebaik-baiknya bilamana terjadi bencana (Horton, Paul B, 1999:190)

Dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi adanya bencana alam.BPBD sebagai lembaga teknis khusus di bidang sosial dalam penanggulangan bencana diharapkan mampu berperan aktif untuk menjadikan masyarakat di daerah rawan bencana menyadari pentingnya bencana, dan mengurangi dampak bencana alam tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah sangatlah penting keberadaanya didalam sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan supaya terdapat pembatasan atas permasalahan yang dipecahkan didalam sebuah peneitian dan menjadikan pembahasan lebih fokus kepada suatu permasalahan utama dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan hal sebagai berikut “Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahap Kesiapsiagaan Bencana Alam di wilayah Kabupaten Jember?“.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan oleh peneliti karena suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan, yang mana tujuan penelitian tersebut nantinya akan menjadikan suatu arahan atau petunjuk didalam pelaksanaan suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam tahapan kesiapsiagaan bencana alam di wilayah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan kedepanya mampu menambah pengetahuan dan memberikan wawasan bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam upaya menentukan langkah selanjutnya dalam hal penanggulangan bencana alam di wilayah Kabupaten Jember.

3. Manfaat Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan mengenai bencana yang disebabkan oleh faktor alam tentunya akan menimbulkan kerugian-kerugian. Baik berupa kerugian korban jiwa maupun kerugian kerusakan infrastruktur. Dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana tersebut memerlukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah pada tingkat pusat maupun pemerintah pada tingkat daerah. Karena permasalahan bencana merupakan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan-kepentingan publik, seperti halnya yang diungkapkan oleh Pramusinto (2009: 129) sebagai berikut:

“bencana erat kaitannya dengan pembangunan, dimana persoalan mengenai bencana sendiri bukanlah semata-mata persoalan fisik yang menyangkut berapa besaran skala bencana, di mana pusat bencana, berapa kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh bencana dan lain – lain. Bencana menyangkut persoalan administrasi publik dan kebijakan publik, karena adanya bencana tersebut mengacu isu-isu sebagai berikut: siapa saja korbannya, berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan, siapa yang harus bertanggungjawab untuk mengatasi persoalan, bagaimana mekanisme organisasi penanggulangan bencana, siapa dan bagaimana melakukan monitoring kegiatan dan lain-lain.“

Konsep dalam suatu penelitian ilmiah mempunyai maksud dan fungsi sebagai penyederhanaan sekaligus memberikan landasan kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Lebih lanjut Singarimbun dan Efendi (2006:33) memberikan pengertian konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Maka sesuai dengan konsepsi teori yang dibutuhkan bagi penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Konsep Administrasi negara.
2. Konsep Organisasi
3. Konsep Peran
4. Menejemen Bencana

2.1 Administrasi Negara

Administrasi dalam arti sempit berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lainnya. Sedangkan dalam arti luas administrasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu yang mempelajari kegiatan tersebut dengan ilmu administrasi negara.

Dengan ruang lingkup yang sangat luas maka tidak mudah untuk mendefinisikan secara khusus apa itu administrasi negara. Henry (dalam Toba, 2005:24) menjelaskan bahwa.

“Terdapat kritis definisi dalam administrasi negara. Itulah sebabnya ia menyarankan untuk dipahami lewat paradigma. Lewat paradigma akan diketahui ciri-ciri dari administrasi negara. Tiap fase dari paradigma mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan lukus dan fokusnya. Lokus menunjukkan dimana bidang studi tersebut dan fokusnya menunjukan pada sasaran speialisasi dari bidang studi.”

Berdasarkan lokus dan fokus suatu disiplin ilmu, Henry (dalam Toba, 2005:24) membagi administrasi negara menjadi lima paradigma.

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Frank J. Goodnow yang merupakan penganut Wilsonia mengemukakan bahwa pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik harus memusatkan perhatiannya terhadap kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut.

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Memusatkan perhatian pada fokus administrasi negara dimana ada prinsip-prinsip administrasi dalam setiap jenis organisasi apapun. Gulick dan Urwick mengajukan tujuh prinsip administrasi dalam anagram POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting).

3. Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Administrasi negara kembali pada induk disiplinnya yaitu ilmu politik, dan locusnya adalah pada birokrasi pemerintah tetapi fokusnya semakin berkurang.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Ilmu administrasi merupakan studi gabungan teori organisasi dan ilmu manajemen, yang kemudian muncul “Pengembangan Organisasi” sebagai bagian dari ilmu administrasi. Namun kemudian muncul masalah baru yaitu tentang garis yang memisahkan antara “public” administrasi dan “private” administrasi. Pada paradigma ini masih belum dapat mengatasi locus administrasi negara.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara

Nicholas Henry mengemukakan adanya paradigma administrasi negara yang baru dengan fokus dan lokus yang sudah jelas. Fokus administrasi negara adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan masalah-masalah publik.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dalam penelitian ini menggunakan paradigma administrasi negara yang ke 5 yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Peran Tahap kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember dengan lokusnya adalah penanganan bencana alam Banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo.

2.1.1 Perspektif Administrasi Negara dalam Bencana

Disadari, kegagalan pemerintah selama ini dalam membangun sebuah bangsa yang tangguh ternyata lebih disebabkan oleh perilaku dan tindakan-tindakan pemerintah sendiri yang cenderung sentralistik, *top-down*, *self-oriented*, monopolistik, *represif*, kurang peka terhadap aspirasi serta partisipasi masyarakat, tidak demokratis, serta penuh korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya, potensi biaya sosial, kerusakan lingkungan hidup harus dibayar mahal oleh masyarakat generasi kini dan mendatang, yang pada akhirnya bermuara pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik beberapa dekade belakangan ini telah cenderung diwarnai oleh berbagai permasalahan yang mencangkup; sentralisasi kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan, terhambatnya saluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan berbagai persoalan lainnya yang menunjukkan dominasi kekuasaan pemerintah. Semuanya itu menunjukkan adanya karakteristik *bad governance*.

Kini telah terjadi pegeseran paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sementara itu, menurut Santosa (2009:130) prinsip-prinsip atau pun karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum. Transparansi, daya tanggap, orientasi terhadap konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, visi strategis dan saling berkaitan yang memberdayakan.

Sudah bisa dipastikan, pendirian sebuah negara mempunyai tujuan. Tujuan tersebut dicantumkan dalam konstitusi negara masing-masing. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersurat cita-cita dan tujuan pembentukan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alinea keempat UUD 1945,

secara tegas menyatakan bahwa tujuan-tujuan yang hendak dicapai pemerintah adalah untuk mengaga segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tentu tidak mudah mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur bangsa kita itu, karena kompleks permasalahannya yang harus ditangani pemerintah dipastikan kan mempunyai dampak dalam kehidupan kemasyarakatan, semakin intensif kegiatan dan tindakan pemerintah, dan semakin pentingnya peranan organisasi-organisasi besar, akan semakin besar dan dalam pula dampak tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Apa yang mereka lakukan itu bersifat publik. Akibat pentingnya arti tindakan dan kegiatan yang bersifat publik itu, maka kemudian berkembang satu kajian baru, yang dikenal dengan nama kebijakan publik.

Untuk mewujudkan misi yang termasuk di dalam aspek yang ingin dicapai oleh organisasi publik harus disertai dengan suatu kebijakan publik. Menurut Candler dan Plano (1988:107) dalam buku Kamus Administrasi Publik dalam Donahue (2003) sebagaimana dikutip oleh Yeremias (2008:60) menjelaskan bahwa, *public policy* adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public atau pemerintah. Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan tidak hanya dilihat sebagai pemanfaatan strategis semata terhadap sumberdaya, akan tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam dan sangat menentukan. Berdasarkan penjelasan Candler dan Plano tersebut, dapat dibenarkan bahwa masyarakat perlu atau turut serta dalam pemerintahan (dalam hal ini kebijakan).

Partisipasi sangat diperlukan dalam rangka demokrasi, bahkan Berelson dalam Ventris (2003) sebagaimana dikutip oleh Yeremias (2008:83) menyatakan bahwa, partisipasi adalah syarat mutlak untuk demokrasi itu bisa hidup atau

terlaksana, Indonesia sebagai Negara yang sudah menerima ideology demokrasi bahkan telah mendapatkan penghargaan demokrasi dan telah diakui oleh dunia internasional, maka partisipasi harus diterima dan dipraktekkan dalam sistem politik, administrasi pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi tidak boleh terpisahkan dalam proses pemerintahan.

Partisipasi secara logis memberi pengaruh positif terhadap kinerja atau pencapaian hasil dan kepuasan. Menurut Wang dan Wart (2007) sebagaimana dikutip oleh Yermias (2008:83), partisipasi juga penting dalam membangun *public trust*. Ketika masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi, maka masyarakat akan beranggapan bahwa pemerintah tidak menipu mereka (masyarakat), pemerintah dekat dengan rakyat, dan pemerintah dapat dipercaya. Partisipasi juga dapat membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang terdidik dan terampil serta masyarakat dapat belajar (*learning process/education and gain skills*). Pemerintah juga memelurkan partisipasi, karena pemerintah dapat meyakinkan masyarakat, membangun *trust*, mengurangi kegelisahan, membangun aliansi strategis (*strategic alliances*), dan mendapatkan legitimasi (*gain legitimacy*).

Berdasarkan uraian tersebut sudah jelas bahwa, sikap merupakan bentuk partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam sebuah kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam *good governance* melalui peran sebuah lembaga yaitu membentuk proses tahapan kesiapsiagaan penanganan bencana, sangat penting dilakukan karena masyarakat merupakan sasaran dari tahapan tersebut secara langsung akan menerima dampak dari adanya tahapan atau program yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.2 Konsep Organisasi

2.2.1 Pengertian Organisasi

Secara konseptual, tersedia banyak definisi yang membingkai pengertian organisasi. Salah satu rumusan teoritis yang sangat komprehensif untuk mendeskripsikan pengertian organisasi adalah dari Chester I Bernard, yang menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian mengenai hal dan mengenai hubungan-hubungan. Berkaitan dengan dimensi hubungan dan organisasi, *Jhon M. Gaus* melihat organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab.

Berpijak pada sejumlah rumusan teoritis organisasi, maka dapat diambil benang merah pengertian, dimana organisasi secara umum dimaknai sebagai wadah serta proses kerja sama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangka hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Unsur-unsur yang melekat dalam suatu organisasi, meliputi: (1) adanya dua orang atau lebih sebagai proses interaksi, (2) adanya maksud untuk kerjasama dan interaksi tersebut sehingga organisasi menjadi wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal, (3) adanya pengaturan hubungan yang dalam organisasi diwujudkan dengan adanya rangkaian hirarki, yaitu hubungan bahwa dalam sesuatu organisasi selalu terdapat atasan dan bawahan dan sifat hubungan tersebut adalah dinamis, dalam arti manusia-manusia yang menduduki jabatan-jabatan tersebut bisa berganti-ganti pada setiap saat diperbaiki, (4) adanya tujuan yang hendak dicapai, sehingga organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan tugas pokok.

Pada dasarnya organisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: pertama, struktur, merupakan suatu cetak biru organisasi yang menunjukkan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama. Struktur ini meliputi desain pekerjaan (mengacu pada proses yang digunakan para pimpinan organisasi merinci isi, metode dan hubungan setiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan individu), dan desain organisasi (menunjukkan dalam struktur organisasi). Adapun faktor kedua adalah proses, merupakan aktivitas yang memberikan nafas kehidupan bagi organisasi. Dalam kategori umum, proses meliputi komunikasi (menghubungkan organisasi dengan lingkungan, termasuk bagian-bagiannya), evaluasi prestasi kerja (dilakukan oleh pimpinan organisasi kepada prestasi individu dan kelompok dalam organisasi), pengambilan keputusan (tergantung pendefinisian yang tepat dan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut), sosialisasi (proses penyadaran individu atas tujuan organisasi), dan pengembangan karier (individu memasuki organisasi untuk tujuan dan karier pribadi mereka).

2.2.2 Prinsip dan Asas Organisasi

Seperti halnya birokrasi, organisasi juga mempunyai patologi. Ada tujuh kecenderungan patologi yang diidap oleh organisasi: (1) tidak adanya rumusan tujuan secara terinci dan jelas, (2) pembagian tugas yang tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batasnya, (3) para anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya semata-mata, sehingga dalam tubuh organisasi menjadi terkotak-kotak dan tidak ada kerjasama antar lini (4) adanya egoisme lini yang menganggap lininya paling penting, (5) adanya pembagian tugas yang tidak seimbang dengan wewenangnya, (6) terlalu banyaknya bawahan yang harus diawasi, sehingga menjadi kewalahan, (7) kecenderungan bawahan menerima perintah lebih dan satu atasan mengenai persoalan yang sama dengan model instruksi yang berbeda.

Dalam kerangka untuk meminimalisir bahkan menghapus patologi tersebut, organisasi harus mempunyai prinsip atau asas sebagai berikut:

1. Adanya perumusan tujuan yang jelas.

Fungsi dasar dari tujuan adalah (1) sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, (2) sebagai sumber legitimasi untuk membenarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, (3) sebagai standar pelaksanaan, dimana segala kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, (4) sebagai sumber motivasi bagi karyawan agar dapat bekerja lebih positif, (5) sebagai dasar rasional bagi kegiatan organisasi.

2. Adanya pembagian tugas yang jelas

Manfaat pembagian tugas yang jelas adalah (1) memperjelas tugas koordinasi, (2) memperlancar pengawasan, (3) dapat menentukan dasar keahlian, (4) menghemat biaya karena tidak terjadi perangkapan tugas, (5) hubungan tugas dapat lebih baik.

3. Koordinasi

Koordinasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah: (1) mengadakan pertemuan formal antara para pejabat dan unit, (2) mengadakan pertemuan informal, (3) membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan, (4) mengangkat koordinator, (5) membuat buku pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan peraturan, (6) komunikasi dengan berbagai cara yang lain.

4. Adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang atasan kepada bawahan setelah diadakan penyerahan tugas pekerjaan kepada yang bersangkutan. Dalam pelimpahan wewenang harus dipertimbangkan (1) batas wewenang dan tanggungjawab yang seimbang, (2) pendapat pegawai yang akan menerima wewenang, (3) kepercayaan bahwa penerima wewenang akan mampu menjalankan tugas

dan tanggungjawab, (4) pemberi wewenang harus tetap memberikan pengawasan, pengarahan dan bimbingan, sehingga tugas dapat dilakukan dengan baik

5. Adanya hierarki

Pengertian hierarki disini adalah banyaknya tingkatan unit kerja dalam suatu organisasi. Hierarki ada baiknya tidak terlalu banyak sehingga keputusan pimpinan tidak mengalami distorsi pengertian untuk diterima oleh bawahan.

6. Adanya rentangan pengawasan

Rentang pengawasan atau rentang kendali merupakan banyaknya bawahan yang sebaiknya dapat diawasi dengan baik. Kemampuan pengawasan dipengaruhi oleh faktor subyektif dan obyektif. Faktor obyektif terdiri dari (1) pekerjaan, (2) tersebar tidaknya yang diawasi, (3) seragam tidaknya pekerjaan yang diawasi. Adapun faktor subyektif terdiri dari (1) umur pengawasan, (2) pengalaman dibidang yang diawasi, (3) kesehatan yang bersangkutan, (4) kecakapan.

7. Adanya pemahaman akan tugas masing-masing dan kaitan tugas secara keseluruhan.

Idealnya setiap bawahan hanya mempunyai satu atasan. Namun bila terpaksa harus mempunyai lebih dari satu atasan, maka dalam memberikan satu perintah harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling berbenturan. Selain itu juga perlu disadari bahwa meskipun masing-masing unit mempunyai tugas sendiri sendiri tetapi merupakan kesatuan dalam organisasi yang bersangkutan.

8. Fleksibel

Struktur organisasi hendaknya mudah dirubah untuk disesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang dilakukan. Pelaksanaan perubahan pada dasarnya tidak boleh mengganggu aktivitas organisasi.

9. Berkelanjutan

Idealnya satu organisasi harus dapat menyediakan berbagai sarana agar dapat melakukan aktivitas operasinya secara terus menerus. Suatu organisasi dibentuk tentunya dilandasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Untuk itulah ketersediaan sarana prasarana menjadi perlu dan signifikan.

10. Keseimbangan

Keseimbangan mengandung pengertian bahwa unit-unit organisasi hendaknya ditempatkan pada struktur organisasi sesuai dengan peranannya. Adapun Prinsip yang melekat pada keseimbangan adalah : (1) beberapa unit organisasi yang mempunyai peranan sama penting harus ditempatkan pada jenjang yang setingkat, (2) unit yang berperan penting hendaknya dijadikan satuan utama dan tidak dijadikan satuan lanjutan (3) unit organisasi yang mempunyai peranan yang menyeluruh jangan ditempatkan dibawah unit lain yang tidak tepat.

2.2.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Menurut penulis pengertian BPBD adalah merupakan lembaga teknis dibidang sosial dalam penanggulangan bencana. BPBD Badan pemerintah yang bergerak dibidang sosial yang mempunyai bagian-bagian struktur birokrasi dan memiliki staf-staf ahli dalam bidang penanganan bencana alam.

Sekretariat BPBD lahir sebagai bentuk proaktif Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu meninggalkan pola lama yang berfokus pada tanggap darurat dan simptomatik ke “memecahkan persoalan dari sumber masalahnya“ serta menjadikan penanggulangan bencana (*disaster management*) menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan pemerintahan, apalagi

bila mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Jember merupakan wilayah rawan bencana.

Terkait dengan Landasan hukum penanggulangan bencana, pemerintah telah menetapkan:

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelohan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
6. Pemendagri 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri sebagai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Harapannya BPBD mampu menangani bencana alam di daerah terdampak bencana, baik sebelum bencana, saat bencana dan setelah terjadi bencana. Sehingga BPBD harus mampu melakukan penanganan bencana alam secara cepat, tepat, efektif dan efisien dengan cara melakukan

pengurangan resiko bencana melalui kegiatan Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan. Peran aktif masyarakat juga diharapkan untuk mendukung kegiatan pengurangan resiko bencana tersebut. Dari upaya-upaya tersebut dimungkinkan dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana alam, yang pada akhirnya masyarakat peduli akan bencana.

2.3 Konsep Peran

2.3.1 Pengertian Peran

Peranan itu penting karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Horton (1999: 119) menyebutkan, konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara tertentu pula. Selanjutnya, peran yang berkaitan dengan pekerjaan akan menimbulkan perubahan kepribadian, sehingga terdapat “pengaruh timbal balik dari manusia terhadap pekerjaan dan dari pekerjaan terhadap manusia.

Peran dijelaskan Horton (1999:118) diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban: peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Dijelaskan oleh Soekanto (2007:213) bahwa peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain itu, pengertian peran yaitu Konsep tentang Peran (*role*) menurut Komarudin (1994;768) dalam buku “*ensiklopedia manajemen*” (dalam eprints.uny.ac.id diakses tanggal 11 Oktober 2013) mengungkap sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti dapat mengambil pengertian peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menunjang usaha pencapaian tujuan.

2.3.2 Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Pada saat ini sudah mulai umum diterima Kredo bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan semua pihak hal ini merupakan gelombang perubahan paradigma dari disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tentu saja upaya upaya pengurangan resiko bencana

mesti dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dipaparkan secara gamblang oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ir Sugeng Triutomo, DESS., dalam “Sesi Akademis Gladi Nasional Penanggulangan Bencana 2012“. Beliau mengatakan “ada tiga pilar pelaku Penanggulangan Bencana, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha. Peran ketiga pelaku itu di atur dalam Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, peran masyarakat diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dan peran lembaga usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29“.

Dengan mengacun kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Sugeng Triutomo menjelaskan tentang proses dan peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Disini bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dan dampak psikologis.

Pengertian penyelenggaraan penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekontruksi. Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Dari sini dapat dilihat Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 Pasal 5 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” Pasal 6 menyatakan Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembagunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standart pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dukumen ontentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Dan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ialah;

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi;
 - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembagunan nasional;
 - b. Pembuatan perencanaan pembagunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasioanal dan daerah;

- d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan bencana lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
 - e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- (2) Penetapan dan peningkatan status bencana nasional dan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
- a. Jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. Kerusakan saran dan prasarana;
 - d. Cakupan luas yang terkena bencana; dan
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya dalam Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007.

1. Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab utama;
2. Gubernur memberikan dukungan perkuatan.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standart pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembagunan; dan
- d. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah Pasal 9 adalah;

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembagunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembagunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Skema penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pascabencana. Visi Penanggulangan Bencana adalah untuk mewujudkan ketaguguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Sedangkan misi penanggulangan bencana adalah:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah. Tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana antara lain:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap Penanggulangan Bencana;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan /bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menyusun pedoman pembentukan BPBD.

Sementara itu tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap penanggulangan bencana;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada daerah 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

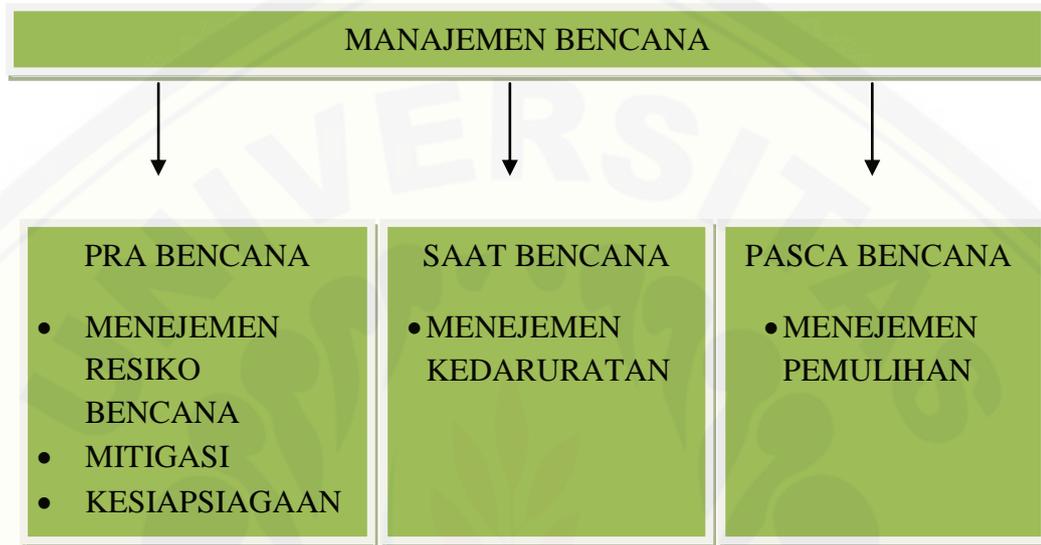
2.4 Manajemen Bencana

2.4.1 Bencana

Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi terancam bencana, Pengertian bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 tertulis bahwa:

“bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dan dampak psikologis “.

Manajemen Bencana diartikan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana.



Gambar 2.1 Manajemen Bencana

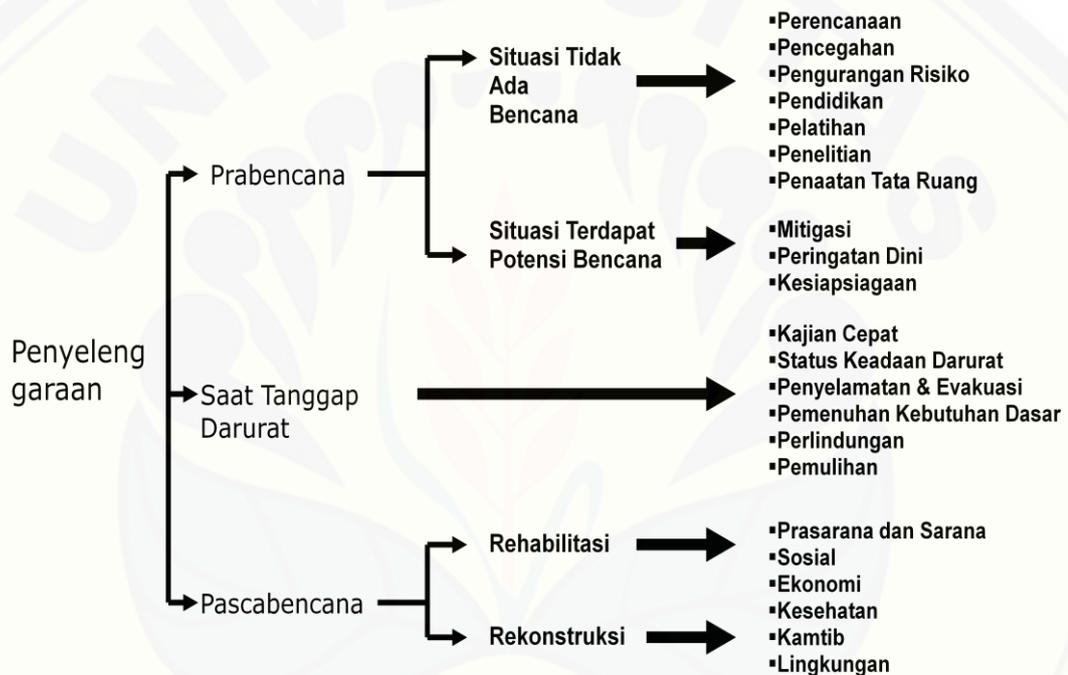
Sumber: SOP Manejemen Penanggulangan Bencana



Gambar 2.2 Siklus Manajemen Bencana

Sumber: SOP dalam mitigasi dan penanganan bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.



Gambar 2.3 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sumber: SOP Manajemen Penanggulangan Bencana

2.4.2 Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui:

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
5. Penyiapan lokasi evakuasi;
6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kesiapsiagaan sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama dalam upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan pada tahap prabencana. Kesiapsiagaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana, yakni pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Hal ini dapat disimpulkan Peran Kesiapsiagaan yang berarti mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana. Mampu mencegah bencana, jika mungkin. Jika tidak, mampu mengurangi dampaknya. Jika ada bencana, dapat menanggulangi secara efektif. Setelah bencana terjadi, mampu pulih kembali. Peran tahap kesiapsiagaan tersebut tertuang dalam 9 kegiatan yang meliputi:

1. Penilaian Resiko (*risk assessment*)
2. Perencanaan Siaga (*contingency palnning*)
3. Mobilisasi Sumberdaya (*resousce mobilization*)
4. Pendidikan dan Pelatihan (*training & education*)
5. Koordinasi (*coordination*)
6. Mekanisme Respon (*response machanism*)
7. Peringatan Dini (*early warning*)

8. Manajemen Informasi (*information systems*)
9. Gladi/Simulasi (*drilling/simulation*)



BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Faisal dalam Kasiram (2008:47) penelitian merupakan sebuah aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya mengenai dunia alam atau dunia sosial. Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh peneliti manapun, tentunya sangat membutuhkan apa yang disebut metode penelitian. Di dalam metode penelitian tersebut terdapat langkah-langkah serta prosedur yang sistematis. Metode penelitian akan menjadi dasar untuk memperoleh data dan menemukan kebenaran ilmiah dalam sebuah penelitian, metode penelitian sangat membantu dalam mengungkap kebenaran ilmiah, sehingga dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan pengertian metode penelitian diatas maka alur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian;
2. Fokus Penelitian;
3. Lokasi Penelitian;
4. Teknik Pengumpulan Data;
5. Penentuan Informan;
6. Metode Analisis Data;
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sugiyono (2007:308) menjelaskan bahwa

penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sementara itu metode yang digunakan adalah metode studi kasus (*case study*) yaitu merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap program.

Kirk dan miller (Dalam Moleong.2000:3) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Sedangkan Moeleong (2000:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif, maka penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana penelitian akan menemukan dan mendeskripsikan pelaksanaan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahapan Kesiapsiagaan Bencana Alam di wilayah Kabupaten Jember. Proposal penelitian yang disampaikan berbentuk deskriptif yaitu berupa data yang berbentuk kata-kata atau kalimat dan bukan berbentuk gambar maupun angka-angka. Penelitian yang dilakukan benar-benar berdasarkan fakta pengamatan yang ada di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2000:78) fokus atau masalah merupakan rumusan yang terdiri atas dua atau lebih faktor yang menghasilkan kebingungan. Ada dua fungsi dari adanya fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus digunakan sebagai

pembatasan studi, hal tersebut dilakukan agar sebuah penelitian tetap fokus dan tidak terlalu melebar. Kedua, penetapan fokus untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pada peran BPBD dalam tahap kesiapsiagaan bencana alam di wilayah Kabupaten Jember dengan kasus bencana banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat peneliti untuk mendapatkan informasi serta data yang diperlukan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diangkat. Penentuan lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan data yang dapat dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapa pun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih dalam oleh seorang peneliti, maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia (Yuswandi dalam Bungin, 2006:136).

Adapun lokasi yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dan Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo (terjadinya bencana banjir).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan yang lebih jelas bagi kepentingan penulis, selanjutnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut.

- a) Pengumpulan Data Primer
 - 1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang dalam penelitian. Menurut Lexi J. Moleong (2000:135) pengertian, “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas pertanyaan itu.

2) Observasi

Seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yang dikutip Moleong (2000:174) mengatakan bahwa pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Melalui metode ini nantinya akan memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam Tahap Kesiapsiagaan, melainkan hanya sebagai pengamat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahap Kesiapsiagaan Bencana Alam di wilayah Kabupaten Jember.

b) Pengumpulan Data Sekunder

1. Dokumentasi

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumber yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan sumber-sumber lain yang mendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Moleong (2000:216) “Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik“. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dengan jalan mencatat dan mempelajari data yang terdapat di lokasi penelitian, berupa surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masih berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta tentang pendataan lain yang masih berada dalam ruang lingkup permasalahan yang diangkat. Keseluruhannya kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyusunan penelitian dengan tidak membatasi jumlah maupun jenis dan sumbernya.

3.5 Penentuan Informan

Informan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan, karena informan adalah orang yang mampu memberikan informasi dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2000:132).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. Menurut Idrus (2009:96) “*purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya”. Sampai saat ini informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bapak Mahmud Rizal, SE selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember;
2. Bapak Heru Widagdo selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember.
3. Bapak Sugeng Priyadi selaku Kepala Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Peneliti memilih informan tersebut dengan pertimbangan bahwa informan dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik *snowball* yaitu teknik penentuan informan yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian informan menunjuk beberapa rekannya untuk dijadikan informan atau dengan kata lain kita tentukan key informan yang kemudian key informan menunjuk bawahannya yang lebih berkompeten sesuai dengan *job description*-nya, orang kedua menunjuk orang lagi hingga permasalahan atau data yang diteliti dapat diperoleh secara menyeluruh. Kriteria penentuan informan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti menurut Moleong (2000:21), yaitu ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan

dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dari data yang telah diperoleh dalam pengumpulan data wawancara dengan Kepala Divisi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Divisi Kedaruratan dan Kepala Desa Wonoasri untuk mendapatkan data yang benar-benar kredibel maka peneliti melakukan pemeriksaan data. Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000:178).

Untuk memeriksa keabsahan data yaitu triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, Patton (dalam Moleong, 2000:178). Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2000:161) alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti berikut ini.

- 1) Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai “bukti” untuk suatu pengujian.
- 3) Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) *Record relative* murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- 5) Keduanya tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian ini.

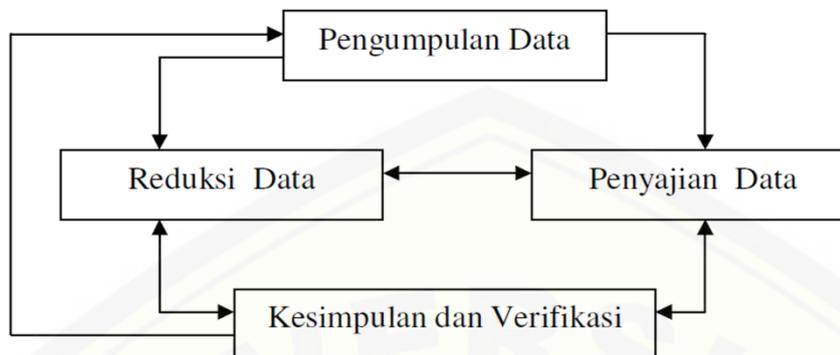
- 6) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Dalam hal ini peneliti dapat mencari data yang menunjang alternatif penjelasan itu. Jika peneliti gagal menemukan “bukti” yang cukup kuat terhadap penjelasan alternatif dan justru membantu peneliti dalam menjelaskan derajat kepercayaan dan hipotesis asli, hal ini merupakan penjelasan “utama” peneliti. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang telah dikemukakan akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

3.7 Metode Analisis Data

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan kajian dan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1986:250) “metode kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut”. Dalam penelitian ini senantiasa terus berusaha mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara informan yang relevan. Analisis data terus dilakukan sejalan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti tidak akan memaparkan semua temuan data yang diperoleh, namun hanya data-data yang terkait dengan batasan penelitian, peneliti juga mempertimbangkan kebaruan atas data yang diperoleh. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2000:3) analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:20), model analisis interaktif dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 3.1 Komponen analisis data: Model Interaktif
 Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Adapun tahap yang akan dilalui adalah sebagai berikut.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga lebih sederhana, mudah diatur dan disistematisasikan dalam memberikan gambaran mengenai hasil penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi, kemudian disajikan dengan menganalisa secara kualitatif, yaitu disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/verification* (Menarik Kesimpulan atau Verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sebelum membuat kesimpulan akhir dari hasil analisis yang di sajikan, terlebih dahulu harus diperiksa keabsahan data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak mengandung unsur subjektivitas dan disajikan dalam bentuk deskriptif.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo

4.1.1 Aspek Geografi

Desa wonoasri merupakan salah satu dari 8 (delapan) desa yang berada di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Jawa Timur Jarak dari Ibukota Kecamatan \pm 8 km ke arah Utara, sedang dari ibukota kabupaten \pm 30 km ke arah Utara. Luas wilayah Desa Wonoasri adalah 624,547 Ha, yang merupakan daerah pertanian yang subur sangat baik untuk pengembangan tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Disamping untuk lahan pertanian tanah tersebut digunakan untuk pemukiman, kantor desa, gedung sekolah, tempat ibadah, makam dll.

Batas administratif Desa Wonoasri adalah;

1. Sebelah Utara ; Desa Sidodadi
2. Sebelah Selatan; Desa Curahnongko
3. Sebelah Barat; Desa Curahnongko
4. Sebelah Timur; Desa Curahnongko

Desa Wonoasri terdiri dari 2 dusun. Kedua dusun tersebut adalah;

1. Duun Kraton
2. Dusun Curahlele

Pola pembangunan lahan di desa Wonoasri lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan, seperti padi, jagung, polowijo. Aktifitas mobilisasi di Desa Wonoasri cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya, karena kondisi jalan yang telah beraspal.Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas

Kesehatan berupa Pustu Desa yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena kurang ditunjangnya infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Wonoasri tidak bisa mengangkat derajat hidup petani karena kebanyakan masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai perantau di luar daerah dan luar negeri bukan petani.

4.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2012, jumlah penduduk Desa Wonoasri adalah 10.957 jiwa, dengan rincian 5.522 laki-laki dan 5.435 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 5	229	243	472	4.31 %
2	6 – 10	337	321	658	6.01 %
3	11 – 15	339	338	677	6.18 %
4	16 – 20	325	334	659	6.01 %
5	21 – 25	501	507	1008	9.20 %
6	26 – 30	556	464	1020	9.31 %
7	31 – 35	443	447	890	8.12 %
8	36 – 40	429	471	900	8.21 %
9	41 – 45	457	449	906	8.27 %
10	46 – 50	324	333	657	6.00 %
11	46 – 50	321	329	650	5.93 %
12	56 – 60	279	291	570	5.20 %
13	61 – 65	267	275	542	4.95 %
14	66 – 70	224	263	487	4.44 %
15	71 – 75	221	232	453	4.13 %
16	75 ke atas	197	211	408	3.72 %

Jumlah Total	5449	5508	10.957	100 %
--------------	------	------	--------	-------

Sumber: Profil Desa Wonoasri

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Wonoasri sekitar 5381 atau hampir 49,11%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Dari jumlah 3245KK di atas, sejumlah 648 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 1134 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 912 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 551 KK tercatat Keluarga Sejahtera III. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka terdapat 1782 KK atau lebih 55% KK Desa Wonoasri adalah keluarga miskin.

4.1.3 Aspek Pemerintahan

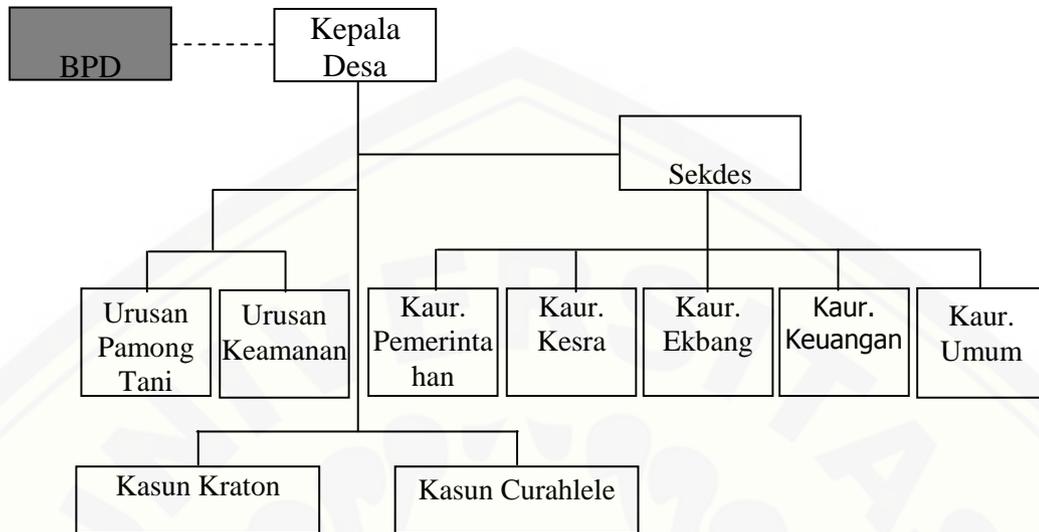
Desa ditengah era otonomi dewasa ini, semakin ditantang untuk mampu melaksanakan pelayanan publik yang baik agar pemerintahan desa mampu dipercaya dan dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dengan otonomi maka penyelenggaraan pemerintah yang baik bisa ditegakkan karena pemerintah desa mempunyai kewenangan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Wilayah Desa Wonoasri terdiri dari 2 Dusun yaitu: Kraton dan Curahlele yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Wonoasri.

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Wonoasri memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Wonoasri tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Wonoasri



Sumber: Profil Desa Wonoasri

Tabel 4.2 Nama Pejabat Pemerintah Desa Wonoasri

No	Nama	Jabatan
1	Sugeng Priyadi	Kepala Desa
2	Abdul Rahman	Sekretaris Desa
3	Eka Dwi Lestari	Staf Sekretariat Desa
4	Boini Santoso	Kepala Urusan Pemerintahan
5	Suyitno	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
6	Lilik Sumartin	Kepala Urusan Umum
7	Al-Ma'arif	Kepala Urusan Ekbang
8	Tirto Santoso	Kepala Urusan Keuangan
9	Siswanto	Kepala Urusan Keamanan
10	Suharyono	Pamong Tani
11	Samiono	Kepala Dusun Kraton
12	Mohammad Toha	Kepala Dusun Curahlele

Sumber : Profil Desa Wonoasri

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Wonoasri kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

4.1.4 Aspek Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Wonoasri, masyarakat selalu mengikuti, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilihan Legislatif, Pilpres, Pemillukada, dan Pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma - norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Pada bulan juli 2010 masyarakat juga di libatkan pada pemilihan Bupati dan Pada bulan Juli 2012 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur dan pada bulan April 2014 masyarakat juga di libatkan pada pemilihan legislatif dan pada bulan juli 2014 masyarakat juga dilibatkan secara langsung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan di akhir tahun 2014 tepatnya bulan Nopember 2014 Desa Wonoasri melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Wonoasri Periode 2014-2020. Walaupun tingkat partisipasinya tidak 100%, namun hampir 80 % daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Wonoasri.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Wonoasri mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Wonoasri kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam hal kegiatan keagamaan, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

4.2 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo termasuk Daerah Rawan Banjir

Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo merupakan salah satu dari sekian banyak Desa setiap Kecamatan di Kabupaten Jember yang termasuk daerah rawan bencana khususnya Bencana Banjir, baik bencana Banjir Bandang maupun Banjir Genangan. Sebanyak 12 Kecamatan dari data BPBD Kabupaten Jember Terancam Bencana Banjir. Untuk mengetahui apakah Desa Wonoasri Kecamatan tempurejo termasuk dalam salah satu daerah rawan Bencana Banjir, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yaitu, “Apakah benar

Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo salah satu daerah rawan Bencana Banjir?''.

Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut.

“Iya.Kecamatan Tempurejo memang termasuk dalam daerah rawan Bencana Banjir.Karena daerah tersebut sebageian besar daerah perkebunan dan mempunyai daerah kemiringan tanah yang drastis, di kelurahan curahtakir, sanenrejo dan andongrejo.Dan banjir tersebut merebah sampai ke Kecamatan Ambulu.Karena kesamaan aliran sungai.”(sumber: Wawancara, Kamis 11 Juni 2015 jam 3.40)

Dari hasil wawancara tersebut, kemudian peneliti membandingkan dengan data dokumen berupa peta rawan Bencana Banjir, bahwa memang benar jika Kecamatan Tempurejo termasuk dalam daerah rawan bencana banjir.Hal ini dapat dilihat dalam pada peta rawan bencana banjir dibawah ini.



Gambar 4.2 Peta Rawan Bencana Kecamatan Tempurejo

Sumber: Data Potensi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Jember

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa titik rawan bencana genangan terjadi di desa/kelurahan wonoasri, dari hal tersebut menunjukan bahwansanya tidak semuanya Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tempurejo sebagai rawan bencana banjir. Tapi pada dasarnya ada 5 daerah rawan Bencana Banjir Genangan di Kecamatan Tempurejo dengan rata-rata 47.208 korban jiwa yang harus diselamatkan, tetapi dampaknya tidak sebesar seperti yang terjadi di Desa Wonoasri. Seperti yang dijelaskan Bapak Heru widagdo selaku Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember bahwa:

“ iya, memang benar di Kecamatan Tempurejo titik rawan bencana banjir ada 5 desa/kelurahan sebab bukan tidak mungkin karena memang dimana 5 desa/kelurahan adalah lahan perkebunan dan mempunyai kemiringan lahan yang lumayan cukup tinggi. Tapi memang benar desa/kelurahan wonoasri-lah yang sering terjadi atau tekena dampaknya paling tinggi.Karena di wonoasri hilir-nya beberapa sungai yang ada di Kecamatan Tempurejo.” (sumber: Wawancara, Kamis 11 Juni 2015 jam 3.40)

Adanya pernyataan tersebut peneliti juga mempertanyakan kepada pihak Kecamatan Tempurejo untuk mengkroscek kebenaran akan daerah mana yang sering terjadi selama bencana banjir ?kemudian Bapak A Muzamil MS selaku PMD menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut.

“Secara garis besar banjir yang terjadi di Tempurejo bertumpuh pada desa wonoasri,karena pada daerah wonoasri terjadi penyempitan aliran sungai akhirnya derasnya air yang seharusnya menuju laut terhambat di daerah wonoasri.” (sumber: Wawancara, 15 juni 2015 jam 12.35 wib)

Hal tersebut ditambahkan oleh pernyataan Bapak suhartono, beliau menjawab:

“Iya, Kali mayang-lah penyebab terjadinya banjir musiman yang terjadi di wonoasri.Karena banjir disana diawali mulai atau mulai dari sanenrejo selaku hulunya dan wonoasri sebagai hilirnya.Karena sungai yang melintas di daerah wonoasri terdapat endapan lumpur yang menumpuk dan terjadi

penyempitan atau kedangkalan sungai yang pada akhirnya terjadi banjir genangan di daerah tersebut. (sumber: Wawancara, Rabu 15 juni 2015 jam 12.35 wib)

4.3 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Kabupaten jember memiliki wilayah seluas 3.293,34 km yang berdampingan dengan gunung berapi aktif, memiliki banyak sungai, daerah pegunungan dan sebagaian berada di daerah pesisir yang berbatasan dengan lautan Indonesia. Saat ini, jumlah penduduk kabupaten jember tercatat 2.330.000 jiwa yang cukup heterogen. Hal ini memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap terjadinya berbagai bencana yang diakibatkan oleh faktor alam maupun bencana yang diakibatkan faktor sosial.

Mengingat kondisi geografis yang memiliki potensi terjadinya bencana alam serta kondisi demografis yang memiliki potensi terjadinya bencana sosial, maka guna mengemban amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 6 November 2012 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jember Nomor : 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja UPT Permadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. BPBD Kabupaten Jember mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember tidak terlepas dari konflik lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan bencana daerah Kabupaten Jember adalah adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Jember yang Aman dan Nyaman Melalui Penanggulangan Bencana yang tanggap, Cepat, dan Tepat”.

- b. Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut diatas secara operasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan Misi “Terwujudnya Kewaspadaan Dan Pengendalian Penanggulangan Bencana”.

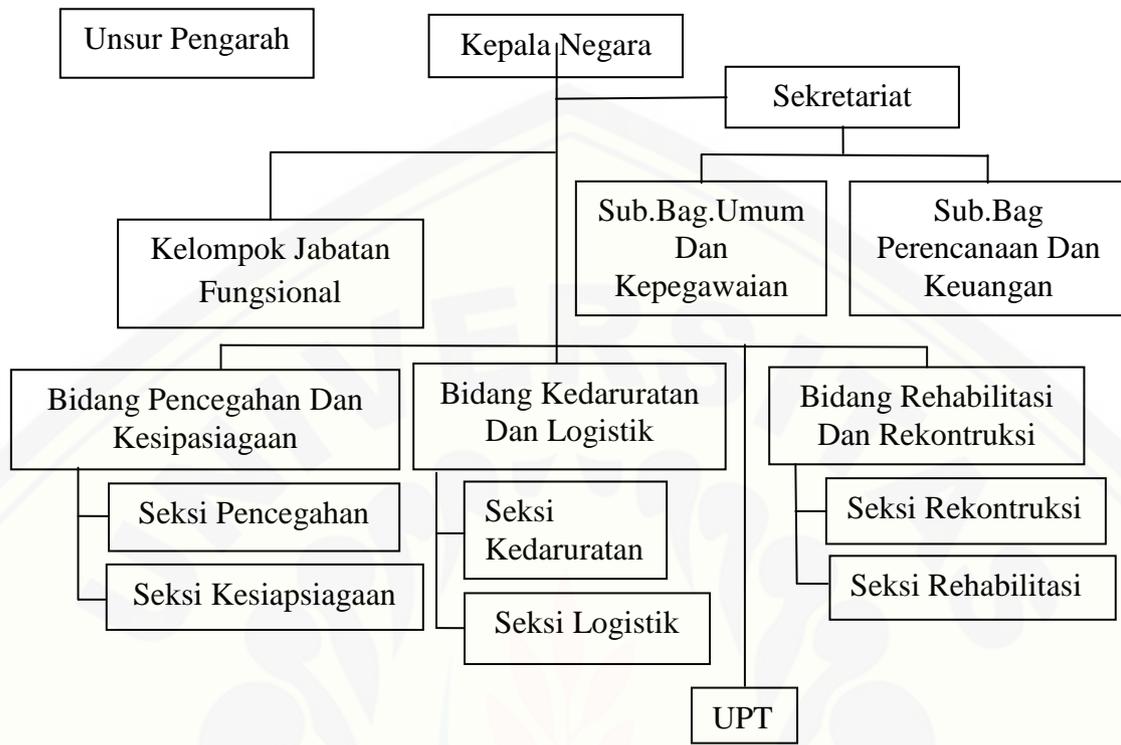
Landasan hukum dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Provinsi/Kota);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Jember;
12. Peraturan Bupati Jember 54 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPT Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 6 November 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, dengan stuktur organisasi sebagai berikut;



Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Jember

Sumber: Data Profil BPBD Kabupaten Jember

Adapun tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Jember yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah:

1. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang Penanggulangan Bencana.

Tujuan ini dijabarkan dalam beberapa sasaran, yaitu antara lain:

- 1) Lancarnya administrasi perkantoran.
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- 3) Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *strategi*:

- 1) Peningkatan keterpaduan program dan anggaran
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana
- 3) Optimalisasi pendidikan, pelatihan, bintek serta sosialisasi penanggulangan bencana

Untuk mencapai tujuan dan sarana, dilakukan dengan *kebijakan*:

- 1) Keterpaduan program dan anggaran
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana
- 3) Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bintek serasi sosialisasi penanggulangan bencana.

2. Terwujudnya standart, kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tujuan ini dijabarkan dalam beberapa *sasaran*, antara lain:

- 1) Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang.
- 2) Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana.
- 3) Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *strategi*:

- 1) Peningkatan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Penyusunan informasi daerah rawan bencana dan kejadian bencana yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *kebijakan*:

- 1) Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 2) Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana

3. Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.

Tujuan ini dijabarkan dalam beberapa *sasaran*, antara lain:

- 1) Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- 2) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
- 3) Peringatan dini, mitigasi dan gladi/simulasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *strategi*:

- 1) Mengimplementasikan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- 2) Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
- 3) Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *kebijakan*:

- 1) Penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/ simulasi bencana.

4. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Tujuan ini dijabarkan dalam beberapa *sasaran*, antara lain:

- 1) Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana.
- 2) Pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan Logistik.
- 3) Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *strategi*:

- 1) Peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat bencana
- 2) Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda.
- 3) Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *kebijakan*:

- 1) Pengkajian dan penentuan status darurat bencana
 - 2) Penyelamatan evakuasi korban dan harta benda.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi.
 - 4) Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana
5. Menangani pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.

Tujuan ini dijabarkan dalam beberapa *sasaran*, antara lain:

- 1) Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- 2) Pemberian bantuan darurat kemanusiaan
- 3) Perbaikan darurat bencana

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *strategi*:

- 1) Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- 2) Pengelolaan sumberdaya bantuan bencana tepat sasaran.
- 3) Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *kebijakan*:

- 1) Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- 2) Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 3) Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

6. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Tujuan ini dijabarkan dalam beberapa *sasaran*, antara lain:

- 1) Penyaluran dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 2) Evakuasi dan relokasi korban bencana.
- 3) Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana.
- 4) Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *strategi*:

- 1) Peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Melestarikan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan lokal.
- 3) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 4) Penerapan mekanisme yang akuntabel dan transparan serta tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan *kebijakan*:

- 1) Melibatkan dan memberdayakan masyarakat.
- 2) Mempertahankan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan lokal.
- 3) Menjadikan kegiatan rehab dan rekon sebagai gerakan masyarakat.
Pelaksanaan pemulihan sarana dan prasarana.

4.4 Hasil Pembahasan Peran BPBD Tahap Kesiapsiagaan

BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Menurut penulis pengertian BPBD adalah merupakan lembaga teknis dibidang sosial dalam penanggulangan bencana. BPBD Badan pemerintahan yang bergerak dibidang sosial yang mempunyai bagian-bagian struktur birokrasi dan memiliki staf-staf ahli dalam bidang penanganan bencana alam.

Sekretariat BPBD lahir sebagai bentuk proaktif Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu meninggalkan pola lama yang berfokus pada tanggap darurat dan sistematis ke “memecahkan persoalan dari sumber masalahnya“ serta menjadikan penanggulangan bencana (*disaster management*) menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan pemerintahan, apalagi bila mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Jember merupakan wilayah rawan bencana.

Peran (*role*) lembaga penyelenggaraan bencana yang didelegasikan kepada BPBD, merupakan sebuah konsekuensi logis dari kedudukan (*status*) yang melekat pada BPBD. BPBD yang diamanatkan oleh penyelenggaraan bencana, dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam masalah penanggulangan bencana melalui hubungan pemerintah daerah, di sini secara otomatis telah menjalankan perannya dalam masyarakat.

Secara konseptual organisasi secara umum dimaknai sebagai wadah serta proses kerja sama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangka hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada dasarnya organisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: pertama, struktur, merupakan suatu cetak biru organisasi yang menunjukkan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama. Struktur ini meliputi desain pekerjaan (mengacu pada proses yang digunakan para pimpinan organisasi merinci isi, metode dan hubungan setiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan individu), dan desain organisasi (menunjukkan dalam struktur organisasi). Adapun faktor kedua adalah proses, merupakan aktivitas yang memberikan nafas kehidupan bagi organisasi. Dalam kategori umum, proses meliputi komunikasi (menghubungkan organisasi dengan lingkungan, termasuk bagian-bagiannya), evaluasi prestasi kerja (dilakukan oleh pimpinan organisasi kepada prestasi individu dan kelompok dalam organisasi), pengambilan keputusan (tergantung pendefinisian yang tepat dan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut),

sosialisasi (proses penyadaran individu atas tujuan organisasi), dan pengembangan karier (dimana individu memasuki organisasi untuk tujuan dan karier pribadi mereka).

Pada konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, akan dilihat sejauhmana upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lebih baik.

Good Governance menjadi paradigma yang digunakan administratur publik di indonesia dalam menjalankan kinerjanya sekarang ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan paradigma tersebut. BPBD Kabupaten Jember menggunakan tiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal ini sama dengan tiga pilar yang digunakan oleh paradigma *Good Governance*. Berikut pernyataan dari bapak rizal selaku kepala divisi pencegahan dan kesiapsiagaan:

“Instansi/lembaga usaha yang lain tidak lepas dari proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sosialisasi di tingkat desa untuk penyampaian informasi tentang daerah rawan bencana, kita tidak lepas dari masyarakat.”(sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Dari pernyataan kepala divisi pencegahan dan kesiapsiagaan tersebut menunjukkan bahwa dalam upaya proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Jember melibatkan instansi dan masyarakat. Masyarakat merupakan pelaku aktif dalam proses penanggulangan bencana. Dalam Undang-undang No 24 Tahun 2007 Pasal 26 Tentang Hak Masyarakat sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Sedangkan lembaga usaha/instansi menurut Undang-undang No 24 Tahun 2007 Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Undang-undang No 24 Tahun 2007 Bab VI Peran Lembaga Usaha Dan Lembaga Internasional Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha Pasal 28 Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Pasal 29 (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan. (3) Lembaga usaha

berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Rencana program dan kegiatan sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD. Hal tersebut mencakup sebagai berikut;

1. Program Generik, yang meliputi antara lain:
 - a. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Peningkatan sarana dan prasana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - c. Pengawasan dan peningkatan SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Program Teknis, Penanggulangan Bencana.
 - a. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencakup bagian Sekretariat
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mencakup bagian Sekretariat
 - c. Program Pengawasan dan peningkatan SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mencakup bagian Sekretariat
 - d. Program penanggulangan bencana mencakup bagian:

- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan kegiatan pokok meliputi:
 - a) Kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko bencana
 - b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 - c) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan kegiatan pokok meliputi:
 - a) Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana
 - b) Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah bencana
 - c) Kesiapsiagaan pengelolaan Logistik dalam penyelenggaraan bencana.
 - d) Kegiatan pengelolaan peralatan dalam penyelenggaraan bencana
- 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dengan kegiatan pokok meliputi:
 - a) Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
 - b) Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana
 - c) Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi bidang sosiasal ekonomi di wilayah pasca bencana.

3. Program Prioritas

Program prioritas yang tercantum dalam program dan kegiatan yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012, antara lain:

- a) Program pelayanan administrasi perkantoran
- b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c) Program peningkatan disiplin aparatur
- d) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- e) Program perbaikan saran dan prasarana akibat bencana alam
- f) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan , mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 5) Penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
- 6) Penetapan rumusan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
- 7) Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- 8) Pemantuan, evaluasi dan analisa pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- 9) Pelaksanaan petugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- 10) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Kesiapsiagaan sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama dalam upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan pada tahap prabencana. Kesiapsiagaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana, yakni pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
5. Penyiapan lokasi evakuasi;
6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kesiapsiagaan sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama dalam upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan pada tahap prabencana. Kesiapsiagaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana, yakni pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Peran Kesiapsiagaan yang berarti mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana. Mampu mencegah bencana, jika mungkin. Jika tidak, mampu mengurangi dampaknya. Jika ada bencana, dapat menanggulangi secara efektif. Setelah bencana terjadi, mampu pulih kembali. Peran tahap kesiapsiagaan tersebut tertuang dalam 9 kegiatan yang meliputi:

1. Penilaian Resiko (*risk assessment*)

Identifikasi ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), melakukan analisis resiko bencana, menentukan tingkat resiko, membuat peta resiko bencana.

Identifikasi Ancaman adalah suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan. *Kerentanan* adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (*hazards*). *Analisis Resiko*, resiko berarti potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonomi. *Tingkat resiko bencana* merupakan perhitungan rata-rata kematian per Negara dalam bencana skala besar dan menengah yang diakibatkan oleh gempa bumi, siklon tropis dan banjir. *Peta resiko bencana* adalah peta petunjuk zonasi tingkat resiko suatu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu. Peta ini bersifat dinamis, sehingga harus direvisi tiap waktu tertentu dan merupakan hasil perpaduan antara peta bahaya dan kerentanan. Peta resiko bencana disajikan berupa gambar dengan warna dan simbol. Penjelasan dimuat dalam bentuk keterangan pinggir. Sumber: IRBI (Indeks Resiko Bencana Indonesia) Tahun 2013.

Untuk mendapatkan gambaran tentang Penilaian Resiko Bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember, peneliti kemudian menanyakan “Apakah dalam tahap kesiapsiagaan BPBD kabupaten Jember sudah melakukan tentang penilaian resiko bencana terkait bencana banjir yang ada di desa wonoasri?” Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Rizal menjawab:

“ya, untuk saat ini kami sudah melakukan hal tersebut baik identifikasi ancaman, kerentanan dan pembuatan peta resiko bencana kami sudah melakukan melalui Rencon (Rencana Cotijensi), Namun dalam analisis resiko bencana memang tidak semua di dokumentasikan, hal ini melihat skala prioritas terhadap RPB yang ditentukan dan melihat skala prioritas terhadap dampak *Hazard* yang paling berbahaya melihat dari pembentukan BPBD pada tahun 2012.” (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak Rizal untuk untuk identifikasi ancaman yang dilakukan oleh tahap kesiapsiagaan dalam melakukan kegiatannya melihat dari sisi hazard yang ada dalam setiap daerah. Dengan hal itu penilaian resiko dapat dilihat dari rumus.

$$\text{Resiko bencana} = \text{Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Hal ini juga dibuktikan dengan sebuah kajian yang itu nantinya berupa sebuah pemetaan kawasan rawan bencana dan hasil kajian tersebut diserahkan kepada Lemlit dan Bapeda daerah. Untuk lebih mudah memahami bentuk kegiatan saat penilaian resiko yang dilakukan Tahap Kesiapsiagaan terkait bencana banjir desa wonoasri, berikut ringkasannya.

Tabel 4.3 Bentuk Kegiatan saat Penilaian Resiko

No	Jenis kegiatan	Dilakukan		Bentuk Kegiatan
		Ya	Tidak	
1	Identifikasi Ancaman	✓		Koordinasi antara BMKG dan BPBD dan instansi terkait.
2	Kerentanan		✓	Miminta surat atau melalui media elektronik tentang perkiraan hujan pada BMKG setelah itu berkoordinasi dengan dinas pengairan
3	Analisis Resiko		✓	-
4	Tingkat Resiko		✓	-
5	Membuat Peta Bencana	✓		Untuk pembuatan peta perpaduan antara peta bahaya dan kerentanan untuk daerah wonoasri belum telaksana. Hanya peta multi resiko rawan bencana Kabupaten Jember.

Sumber: (Wawancara, Kamis 01 Oktober 2015 jam 16.15 WIB)

Dari tabel diatas menunjukan bahwa pada proses penilaian resiko masalah banjir yang terjadi di desa wonoasri oleh BPBD Kabupaten Jember belum terlaksana sepenuhnya, di lihat dari sisi Identifikasi Ancaman, BPBD Kabupaten Jember seharusnya bisa menghitung seberapa besar ancaman jika terjadi banjir yang terjadi wonoasri. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap Identifikasi Kerentanan, karena ketika mengetahui Jenis Ancaman dan kerentanan akan menghasilkan sebuah analisis dan tingkat resiko bencana.

Pada Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2013, Kabupaten Jember berada di tingkat 10 besar dengan skor 219, kelas Resiko Tinggi untuk bencana multi Ancaman sedangkan untuk Indeks resiko Banjir Kabupaten dalam IRBI Tahun 2013 menunjukan Jember dengan skor 36 dan kelas Resiko Tinggi. Dari data itu seharusnya BPBD Kabupaten Jember lebih mudah dalam menganalisis

resiko bencana, dari segi Ancaman dan Kerentanan banjir yang terjadi di wonoasri.

Dalam gambar 4.4 dilihat dari sisi membuat peta bencana memang BPBD membuat Peta Rawan Bencana untuk Kabupaten Jember berdasarkan jenis bahaya untuk masing daerah. Tapi peta yang menunjukkan perpaduan antara bahaya dan kerentanan resiko banjir khususnya banjir yang terjadi di wonoasri tidak ada. Dimana yang seharusnya peta resiko dihasilkan mencakup juga peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Sedangkan dokumen memuat tingkat resiko bencana yang merupakan gabungan dari tingkat kerugian, tingkat bahaya dan tingkat kapasitas. Mekanisme penyusunan peta resiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen kajian resiko bencana.



Gambar 4.4 Peta Rawan Bencana Bencana Kabupaten Jember
Sumber: Data Potensi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Jember

2. Perencanaan Siaga (*contingency planning*)

Menentukan satu jenis ancaman, membuat skenario kejadian, menyusun kebijakan penanganan, mengkaji kebutuhan, inventarisasi sumber daya, membuat perencanaan setiap sektor.

Untuk menentukan jenis ancaman harus mengetahui data kajian resiko yang dimana kajian tersebut terdiri dari data bahaya per jenis bencana, jiwa terpapar per jenis bahaya, kerugian rupiah per jenis bencana, kerusakan lingkungan per jenis bencana dan kapasitas pemerintah daerah per kabupaten/kota.

Untuk mengetahui kegiatan perencanaan siaga yang dilakukan oleh Tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember, peneliti menanyakan, “Langkah seperti apa yang dilakukan saat proses perencanaan siaga terhadap penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Desa Wonoasri?” menanggapi pertanyaan itu, kemudian Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjawab:

“Dalam melakukan proses perencanaan siaga, yaitu kami melakukan kajian tentang daerah rawan bencana yang nanti sebagai langkah awal dalam melakukan tindakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rencon (Rencana contingency) atau biasa disebut rencana ketidakpastian dibuat melaikan untuk kita tetap siaga dalam hal ketika bencana itu benar terjadi. (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Tabel 4.4 Bentuk Perencanaan Siaga Tahap Kesiapsiagaan

No	Jenis kegiatan	Dilakukan		Bentuk Kegiatan
		Ya	Tidak	
1	Jenis Ancaman	✓		
2	Skenario Kejadian	✓		
3	Menyusun Kebijakan	✓		-
4	Mengkaji Kebutuhan	✓		-
5	Iventarisasi Sumberdaya		✓	
6	Peran setiap Sektor		✓	

Sumber: (Wawancara, Kamis 01 Oktober 2015 jam 16.15 WIB)

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas soal masalah perencanaan siaga peneliti menggupas apa yang dilakukan saat kegiatan tersebut. seperti apa yang dikatakan Bapak Rizal dalam menentukan jenis ancaman Tahap Kesiapsiagaan menyerahkan kepada ahli-ahli dan keilmuan seperti PVMBG dan BMKG. Untuk membuat skenario kejadian mengacu pada asumsi tentang rencana cotijensi yang dimana dikelompokkan menjadi skenario bencana ringan, skenario bencana sedang dan skenario bencana berat. Hal itu dilakukan secara berbeda setiap skenario. Untuk hazard yang terjadi di kaji oleh ahli dan soal kerentanan dilakukan oleh BPBD yang bekerjasama dengan dengan lemlit.

Untuk menyusun sebuah kebijakan penanganan bencana Bapak Rizal Berkomentar penyusunan itu dilakukan sesuai Renop (Recana Operasi) yang dokumen itu ditulis langkah-langkah saat terjadi kejadian bencana. Untuk mengkaji kebutuhan dilakukan dengan *Stakeholder* untuk menghitung setiap teknis yang akan dilakukan dengan kapasitas bisa menanggulangi bencana lebih besar. Dalam membuat membuat setiap sektor BPBD membentuk Cluster-cluster tiap bidang yang dapat melakukan asesment dan penerapannya dilakukan oleh tim reaksi cepat.

3. Mobilisasi Sumberdaya (*resource mobilization*)

Iventarisasi semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah/sektor, identifikasi sumberdaya yang tersedia dan siap digunakan. Identifikasi sumberdaya dari luar yang dapat dimobilisasi untuk keperluan darurat.

Untuk mendapatkan gambaran tentang Mobilisasi Sumberdaya, peneliti kemudian menanyakan “Apakah Mobilisasi Sumberdaya dalam tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember sudah di jalankan saat banjir di Desa Wonoasri ?” dan “Siapa yang berperan dalam Mobilisasi Sumberdaya saat Bencana Terjadi?” Kepala Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Rizal menjawab:

“Untuk hal ini kami selaku BPBD Kabupaten Jember, dalam melakukan mobilisasi sumberdaya sudah membukukan semua bagian dari sumberdaya yang ada, hal ini terbagi setiap sektor baik itu sumberdaya manusia maupun sarana dan prasana yang ada. Seiring berdirinya BPBD kabupaten Jember pada tahun 2012.”(sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Kemudian beliau menambahkan:

“Dan untuk peran yang paling sering dalam melakukan mobilisasi sumberdaya pada saat bencana maupun saat identifikasi bencana adalah SATGAS (Satuan Tugas) yang pada pelaksanaannya berkoordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.” (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Pada intinya BPBD berkerjasama dengan setiap badan Stekholder lainnya fungsi BPBD adalah sebagai komando untuk menginstruksi berbagai sektor dengan kewenangan usulan dari Isidencomander. Bentuk mobilisasi sumber daya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 4.5 Mobilisasi Sumber Daya

No	Jenis kegiatan	Dilakukan		Bentuk Kegiatan
		Ya	Tidak	
1	Identifikasi ketersediaan dan pembagian sumber daya		✓	
2	Identifikasi aktor, konektivitas dan peran antar aktor		✓	
3	Identifikasi ketersediaan sumber daya		✓	
4	Identifikasi kebutuhan, kesejangan dan mekanisme mobilisasi sumber daya		✓	

Sumber: (Wawancara, Kamis 01 Oktober 2015 jam 16.15 WIB)

Dalam mobilisasi Sumber Daya studi Banjir yang terjadi di Desa Wonoasri Tahap Kesiapsiagaan tidak melakukan identifikasi ketersediaan dan pembagian sumber daya hal tersebut tidak dilakukan sama sekali langkah dari awal identifikasi sampai dengan peran setiap sektor yang dimana mobilisasi sumber daya berguna akan nantinya berlangsungnya ketika bencana itu berlangsung. Tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember hanya bertumpuh pada SATGAS (satuan tugas) dalam mengerakkan sumber daya saat bencana berlangsung.

4. Pendidikan dan Pelatihan (*training & education*)

Di kegiatan ini melakukan pendidikan di sekolah- sekolah dan melakukan pelatihan secara kontinyu. Berupa manajerial dan teknis operasional.

Untuk mengetahui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember, peneliti menanyakan, “Apakah proses pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Desa Wonoasri terkait masalah Banjir sudah dilakukan oleh BPBD khususnya Tahap Kesiapsiagaan?” menanggapi pertanyaan itu, kemudian Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjawab:

“Ya proses tersebut kami lakukan, pada saat itu konsen kita pada kawasan atau daerah rawan bencana Gunung Raung. Karena Rencon yang kami kerjakan adalah *hazard* dari resiko paling bahaya pada saat terjadinya bencana.” (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Beliau juga menambahkan;

“Soal pendidikan dan pelatihan kalau tolak ukurnya sosialisasi kami menggunakan relawan yang berperan didalamnya. kami juga mengandeng elit lokal dalam penerapan sebuah pendidikan mengenai penanggulangan bencana.” (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Tabel 4.6 Pendidikan dan Pelatihan

No	Jenis kegiatan	Dilakukan		Bentuk Kegiatan
		Ya	Tidak	
1	Pendidikan dan Pelatihan		✓	

Sumber: (Wawancara, Kamis 01 Oktober 2015 jam 16.15 WIB)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan soal banjir Desa Wonoasri BPBD Kabupaten Jember khususnya Tahap Kesiapsiagaan tidak terlaksana karena rencana kotijensi saat awal berdirinya BPBD masih menitik beratkan pada Hazard dari resiko paling bahaya pada saat terjadinya bencana yaitu bencana gunung berapi Raung. Sedangkan untuk masalah banjir belum ada tentang rencana kontijensi.

5. Koordinasi (*coordination*)

Membentuk forum koordinasi, menyelenggarakan pertemuan berkala secara rutin, saling bertukar informasi, menyusun rencana terpadu.

Untuk mendapatkan gambaran tentang Koordinasi, peneliti kemudian menanyakan “Bagaimana sistem Koordinasi saat bencana Banjir yang dilakukan BPBD Kabupaten Jember dalam Tahap Kesiapsiagaan?” dan “Dengan siapa koordinasi selama ini saat Bencana Terjadi?” Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Rizal menjawab:

“Untuk soal koordinasi yang dilakukan secara rutin di dalam lembaga maupun diluar lembaga kami selaku Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yang dimana mampu mengenali ancaman bahaya.Lah, sebagai salah satu contoh, untuk masalah banjir.Kami selaku tahap Pencegahan dan Kesiapsiagaan berkoordinasi dengan BMKG.Yang dimana mengetahui ancaman bencana, akan terjadi curah hujan yang sangat tinggi.”(sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Dalam hal mengenai Koordinasi BPBD salah satunya membentuk forum PRB yang dilakukan pada PRA-Bencana yang menghasilkan sebuah Rencon (Rencana Cotijensi). Pada koordinasi juga menghasilkan kesepakatan dan komitmen antar berbagai sektor.

Tabel 4.7 Bentuk kegiatan Koordinasi

No	Jenis kegiatan	Dilakukan		Bentuk Kegiatan
		Ya	Tidak	
1	Membentuk forum koordinasi	✓		Sosialisasi tentang forum PRB
2	Pertemuan secara rutin		✓	
3	Menyusun rencana terpadu		✓	

Sumber: (Wawancara, Kamis 01 Oktober 2015 jam 16.15 WIB)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember Tahap Kesiapsiagaan hanya bersifat kondisional yang dimana koordinasi dengan BMKG melalui media elektronik. PRB (Pengurangan Resiko Bencana) dibentuk tidak ditujukan oleh Bencana Banjir yang terjadi melainkan bersifat keseluruhan. Disini dapat terlihat tahap kesiapsiagaan sistem koordinasi ketika bencana banjir tidak ada karena tidak adanya pembentukan forum koordinasi, yang ada hanya bentuk sosialisasi tentang forum PRB saja. Selama bencana banjir terjadi koordinasi yang dilakukan melalui masyarakat setempat, dimana sebelumnya mengetahui informasi dari BMKG dan melihat curah hujan.

6. Mekanisme Respon (*response mechanism*)

Menyiapkan posko, menyiapkan tim reaksi cepat, mempunyai prosedur tetap, menentukan incident commander, melakukan upaya penanganan di luar prosedur rutin.

Untuk mengetahui Mekanisme Respon yang dilakukan oleh Tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember, peneliti menanyakan, “Mekanisme Respon seperti apa yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember khususnya Tahap Kesiapsiagaan pada saat Bencana Banjir di desa Wonoasri?” menanggapi pertanyaan itu, kemudian Bapak Rizal Kadiv Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjawab:

“Ya kalau soal Mekanisme Respon ketika ada bencana apapun bencana itu, secara otomatis kami bertindak sesuai prosedur. Meskipun saya sendiri sebagai Kepala Bidang dan saya berhak menginstruksikan kepada bawahan akan proses reaksi cepat saat terjadinya bencana. Namun saat bencana terjadi semua bidang yang ada menjadi satu kesatuan. Karena tidak mungkin juga bidang kesiapsiagaan yang hanya turun, saat bencana terjadi bidang kedaruratan juga berperan aktif. (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Tabel 4.8 Bentuk Mekanisme Respon

No	Jenis kegiatan	Dilakukan		Bentuk Kegiatan
		Ya	Tidak	
1	Menyiapkan Posko	✓		Tersedianya posko pelayanan
2	Tim Reaksi Cepat	✓		Membentuk tim reaksi cepat berbagai sektor
3	Prosedur yang tetap	✓		Terbuatnya SOP kedaruratan
4	Incident Comender		✓	

Sumber: (Wawancara, Kamis 01 Oktober 2015 jam 16.15 WIB)

Didalam mekanisme respon terbagi menjadi beberapa kegiatan maka dari pada itu peneliti menjelaskan setiap kegiatan yang ada didalamnya sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak Rizal bahwa dalam mekanisme respon untuk menyiapkan posko BPBD khususnya tahap kesiapsiagaan sudah berkoordinasi sebelumnya pada sektor terkait dan bertukar informasi dengan ahli-ahli dalam menentukan posko yang memang pantas atau layak ketika bencana terjadi dengan melihat sampai sejauh mana dampak yang akan terimbas. Disitu BPBD dapat mempehitungkan jarak evakuasi yang aman. Untuk tim reaksi cepat melaksanakan

saat bencana itu memang terjadi tim reaksi cepat tersebut mengaplikasikan apa yang menjadi pelajaran atau simulasi ketika ada bencana. Tim reaksi cepat terbagi menjadi claster-claster asesment yang bertugas mengidentifikasi korban bencana. Prosedur tetap dibuat melalui rujukan pada SOP (Standart Operasinal Prosedur) dan SOP sendiri bagian dari Rencon yang sudah dibuat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme respon BPBD Kabupaten Jember khususnya tahap kesiapsiagaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kekurangannya adalah mekanisme respon tersebut dilakukan saat bencana berlangsung, yang pada dasarnya kesiapsiagaan sendiri alangkah lebih baiknya dilakukan sebelum bencana banjir itu terjadi, dengan melihat sejarah resiko dari bencana banjir sebelumnya.

7. Peringatan Dini (*early warning*)

Peringatan Dini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 8 berarti serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Peringatan Dini adalah Penyampaian informasi yang tepat waktu dan efektif, melalui kelembagaan yang jelas, sehingga memungkinkan setiap individu yang terancam bahaya dapat mengambil langkah untuk menghindari atau mengurangi resiko dan mempersiapkan diri untuk melakukan upaya tanggap darurat yang efektif.

Untuk mendapatkan gambaran tentang Peringatan Dini, peneliti kemudian menanyakan “Sistem Peringatan Dini seperti apa yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember dalam Tahap Kesiapsiagaan terkait masalah Bencana Banjir di Desa Wonoasri?” dan “Bagaimana Sistem Peringatan Dini dilakukan?” Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Rizal menjawab:

“EWS (early warning system) dilakukan ketika ada analisis-analisis tentang akan datangnya bencana. Sebagai contoh pada musim penghujan. Pada hal ini kami berkoordinasi dengan BMKG agar mengetahui curah hujan yang terjadi disetiap daerah. Hal ini sebagai langkah agar menghindari atau mengurangi resiko dan mempersiapkan diri untuk melakukan upaya tanggap darurat yang efektif.” (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Untuk teknis melakukan kegiatan peringatan dini diawali oleh lembaga yang dimana menginformasikan kepada Badan pengkulangan Bencana daerah setelah itu BPBD melakukan koordinasi dengan sektoral, Dimana sektoral ini melibatkan masyarakat ataupun pemerintah. Pada hal peringatan dini disini capaiannya adalah mengusikan korban. Adapun bentuk sebuah kegiatan peringatan dini yang dilakukan oleh Tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember.

Tabel 4.9 Bentuk Kegiatan Peringatan dini

No	Jenis kegiatan	Dilakukan		Bentuk Kegiatan
		Ya	Tidak	
1	Sosialisasi sistem peringatan dini dan 4 elemen kunci: hubungan sistem peringatan dini Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke masyarakat	✓		sosialisasi tentang sistem peringatan dini sampai ke tingkat desa
2	Perumusan sistem dan mekanisme peringatan dini		✓	
3	Analisa dan pembuatan draft dokumen sistem peringatan dini		✓	

Sumber: (Wawancara, Kamis 01 Oktober 2015 jam 16.15 WIB)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan Peringatan Dini yang dilakukan oleh tahap kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember kurang berjalan secara baik, karena pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat kurang terkoordinasi secara baik. Pada kenyataannya bencana banjir yang di Desa Wonoasri masih berdampak kerugian materiel saat bencana melanda hal ini terjadi karena sosialisasi tentang sistem peringatan dini sampai ke tingkat desa kurang berjalan secara maksimal. Perumusan sistem dan mekanisme serta Analisa dan pembuatan draf dokumen sistem peringatan dini juga belum terbuat hal ini mengakibatkan hal serupa akan terulang kembali ketika ketidaksiapan sebuah peringatan dini kepada masyarakat.

8. Manajemen Informasi (*information systems*)

Menciptakan sistem informasi yang mudah diakses, dimengerti dan disebarluaskan. Informasi tersebut harus disampaikan secara akurat, tepat waktu, dapat dipercaya dan mudah dikomunikasikan.

Untuk mengetahui Manajemen Informasi yang dilakukan oleh Tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember, peneliti menanyakan, “Manajemen Informasi seperti apa yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember khususnya Tahap Kesiapsiagaan pada saat bencana banjir di Desa Wonoasri?” menanggapi pertanyaan itu, kemudian Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjawab:

“Untuk Manajemen Informasi selama kami terbentuk mulai tahun 2012 informasi yang sudah kami dapatkan secara berkoordinasi dan adanya kajian tentang rawan resiko bencana, sebgaaian besar sudah dapat di akses secara gamblang oleh masyarakat melalui sosial media. Kami juga melakukan penyebarluasan tentang kajian resiko bencana yang ada di kabupaten jember, yang penyampain tersebut diberikan kepada pemerintah daerah setempat.” (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Informasi sendiri berfungsi untuk menekan pada masyarakat akan pentingnya sebuah tahap kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Selama ini manajemen informasi dilakukan dalam bentuk berbagai media seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Rizal informasi itu diterapkan pula ke dalam Rencon yang mengajak masyarakat membentuk desa tangguh bencana. Capaian yang diharapkan oleh lembaga adalah agar masyarakat paham akan hazard yang terjadi. Minimal masyarakat tau cara menghindari sebuah bencana yang ditekankan disini bukan untuk menghentikan bencana tapi melainkan untuk meminimalisir korban.

9. Gladi/Simulasi (*drilling/simulation*)

Gladi/simulasi disini dimaksudkan untuk menguji tingkat kesiapsiagaan, yang hal itu perlu dilakukan uji lapangan berupa Gladi/Simulasi. Gladi/Simulasi harus dilakukan secara berkala, agar masyarakat dapat membiasakan diri.

Untuk mengetahui Gladi/Simulasi yang dilakukan oleh Tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember, peneliti menanyakan, “apa Gladi/Simulasi dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember khususnya Tahap Kesiapsiagaan di Desa Wonoasri ?” menanggapi pertanyaan itu, kemudian Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjawab:

“Iya, selama ini Gladian soal penanggulangan bencana kami lakukan mengikuti kajian-kajian/analisis-analisis yang sudah dibuat. Rillnya, Gladian itu dilakukan kepada masyarakat lereng raung daerah Sumberjambe dan Gladian soal bencana Tsunami kepada masyarakat pesisir selatan, untuk Gladian masalah banjir di Wonoasri kami belum lakukan.”(sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Gladi atau simulasi disini dimaksudkan agar supaya apa yang menjadi sebuah kegiatan maupun aktivitas yang sudah menjadi rujukan dari sebuah kajian itu dapat diterapkan pada situasi senyatanya. Dalam bahasa lainnya adalah ujicoba. Dari seluruh aktifitas yang sudah dilakukan oleh sebuah kegiatan pada tahap kesiapsiagaan berpuncak pada pada gladi atau simulasi. Dari mulai sebuah

kajian, dokumen RPB, Strategi penanganan skenario, Rencon.Renopdan hasilnya adala simulasi.

Tabel 4.11 Bentuk kegiatan Gladi

No	Jenis kegiatan	Dilakukan		Bentuk Kegiatan
		Ya	Tidak	
1	Gladi posko		✓	
2	Simulasi		✓	

Sumber: (Wawancara, Kamis 01 Oktober 2015 jam 16.15 WIB)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Gladi/Simulasi terhadap bencana banjir yang terjadi di Desa Wonoasri tidak dilakukan oleh BPBD Tahap Kesiapsiagaan hal itu sangat disayangkan karena melihat Desa Wonoasri termasuk daerah langganan banjir. Gladi/simulasi diadakan mulai dari sebuah kajian, dokumen RPB, Strategi penanganan skenario, Rencon.Renopdan hasilnya adala simulasi. Melihat hal tersebut kajian tentang masalah banjir belum dilaksanakan sama sekali, karena selama terbentuknya BPBD Kabupaten Jember kajian dan rencana kontijensi dipusatkan pada penanganan bencana Gunung berapi, yang dimaksud adalah Gunung Raung.

4.5 Pembahasan Umum tentang Bencana Banjir Desa Wonoasri

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dan wawancara mendalam secara langsung (*indepth interview*) untuk menggali data-data primer. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan tentang Tahap kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember dalam bencana alam dengan studi kasus bencana banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo.

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal sehingga system pengaliran air yang terdiri dari sungai dan

anak sungai alamiah serta system drainase dangkal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dalam Tahap Kesiapsiagaan dalam menangani masalah banjir yang terjadi di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo selama ini hanya menitik beratkan kepada tindakan gawat darurat saja. Fakta ini diperkuat dengan pernyataan bapak rizal selaku Kepala Divisi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember.

“Sebenarnya bukan bertindak saat gawat darurat saja. Melihat dari berdirinya BPBD Kabupaten Jember pada tahun 2012. Kami sudah melakukan analisa-analisa soal kerentanan daerah rawan bencana yang dibukukan menjadi sebuah kajian. Dan sementara hanya beberapa daerah yang sudah dikaji akan daerah resiko bencana. Maka dari pada itu kami tidak hanya menungu akan sebuah kajian. Dan tidak harus semua daerah harus dijadikan sebuah kajian tentang resiko bencana. Karena kita dapat bertindak dengan melihat sebuah sejarah yang terjadi sebelumnya. misalkan kejadian banjir, kita tidak perlu menungu sebuah kajian masalah banjir terlebih dahulu. Karena apa kalau kita bertindak menungu sebuah kajian seluruh daerah rawan bencana, hanya demi sebuah karya ilmiah. Maka dampaknya akan luar biasa. (sumber: Wawancara, Jum'at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Hal ini tentu saja sangat kurang efektif, kenapa harus bertindak saat bencana melanda, kenapa lembaga tidak bertindak sebelumnya. hal ini sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya menitik beratkan kepada tindakan gawat darurat saja. Melainkan menjadi satu kesatuan dalam sebuah manajemen bencana.

Karena pada Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah salah satu dari banyak desa yang ada di Kabupaten Jember yang menjadi sorotan publik karena setiap musim penghujan desa tersebut tergenang banjir setiap tahun-nya. Dan hal ini diperjelas oleh Bapak Sugeng Priyadi selaku kepala Desa Wonoasri.

“ iya mas..banjir di desa wonoasri bukan menjadi rahasia publik sudah. Sudah umum, jadi setiap tahun jadi langganan banjir.Tapi subtansinya itu karena hutan gundul. Sisi lain faktornya penyumbatan beberapa saluran DAS. Jadi daerah aliran sungai memang endapannya luar biasa.Yang ketiga, wonoasari itu memang aliran dari 3 desa, selain andongrejo yang tadi menjadi hutan gundul dan curahnongko dari bagian selatan, kalau wilayah utara itu kali sanen yang lurus dengan mbaba. Dampaknya ketika endapan itu sudah penuh itu akan membanjiri atau meluber ke desa wonoasri. Ketika air tergenang 1 kali 24 jam itu tidak habis.Minimal 1 meter, hampir seperempat dusun kraton, kalau curahlele hanpir setengahnya itu tiap tahun.”(sumber: Wawancara, Senin 22 Juni 2015 jam 10.43)

Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya menitik beratkan pada kinerja organisasi yang di dalam administraturnya tidak lepas dari pandangan paradigma *Good Governance* demi melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lebih baik. Ditinjau dari keorganisasian proses penyelenggaraan penanggulangan bencana menggunakan tiga pilar didalamnya yaitu lembaga, masyarakat dan dunia usaha. Pelibatan tersebut dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai proses penanggulangan bencana yang baik dan efisien. Dalam kasus banjir yang terjadi di Desa Wonoasri semuanya tidak lepas dari sebuah berbagai peran di dalamnya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kapuaten Jember yang selama ini berperan langsung dalam sebuah kegiatan bencana. Beliau mangatakan:

“Instansi/lembaga usaha yang lain tidak lepas dari proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sosialisasi di tingkat desa untuk penyampaian informasi tentang daerah rawan bencana, kita tidak lepas dari masyarakat.”(sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Mendengar pernyataan seperti itu peneliti mengkroschek kebenaran dari Bapak Sugeng Priyadi selaku Kepala Desa Wonoasri yang dimana setiap tahun mengetahui selama proses bencana banjir.

“Pada proses bencana banjir yang ada di Desa Wonoasri kemaren ada sebuah penyelesaian yang dibantu oleh BNPB dan BPBD pada tahun 2014 dalam masalah endapan yang ada di sungai. Berupa penyudetan kalau kita menyebutnya dari salah satu sungai sampai akhirnya nanti menuju ke muara laut.”(sumber: Wawancara, Senin 22 Juni 2015 jam 10.43)

Dari sini dapat dinilai bahwasanya ada peran aktif dalam lembaga yang dimana memjalain kerjasama antara masyarakat agar supaya bencana banjir yang terjadi dapat di minimalisir. Proses kegiatan seperti seharusnya dilakukan jauh sebelum hari, manakala hal ini dirasa pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada lembaga terkait yang disini adalah BPBD.

Menejemen Bencana merupakan sebuah perencanaan yang dibuat dalam proses penyalenggaraan penanggulangan bencana agar menjadi terstruktur dan sistematis. Disini penulis membahas akan sebuah menejemen bencana yang berfokus pada Pra-bencana khususnya Tahap Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Menajemen Bencana sendiri sudah di atur dalam sebuah penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui Undang-undang No 24 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dalam kasus bencana banjir di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo pasti tidak lepas dari Menejemen Bencana karena tidak mungkin ketika bencana terjadi tidak ada tinjak lanjut dari sebuah tindakan yang itu guna untuk menimalisis korban dan kerugian harta benda. Meskipun peran yang selama ini dilakukan dalam masalah bencana banjir di Desa wonoasri hanya menitik beratkan pada saat kedaruratan saja. Baik juga pada pasca bencana Menajemen Bencana disini berpengaruh terhadap pada proses rehabilitasi dan rekontruksi kepada masyarakat. Dengan adanya siklus Manajemen Bencana tersebut pada akhirnya mengetahui akan pentingnya kesiapsiagaan daerah rawan bencana.

Ditinjau dari sisi Tahap Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan tugas dan fungsi yang terkandung didalamnya. Harapannya dapat mengatasi kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten. Pada tahap kesiapsiagaan ini dilakukan upaya-upaya yakni pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember.

“Pencegahan dan pengurangan resiko bencana, kemudian dokumen rencana penanggulangan bencana, dan rencana contingency, ini bagian dari upaya-upaya kesiapsiagaan. Kalau itu sudah dilakukan maka bisa dikatakan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana itu berhasil. Jika kalau EWS (early warning system) atau yang disebut peringatan dini dilakukan tapi masyarakatnya tidak siap sama juga prodi. Makannya tahap pra-bencana yang meliputi mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan ini juga harus dilakukan. Kalau langkah-langkah ini tidak bisa dilakukan maka yang terakhir adalah kebijakan relokasi.”(sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa proses penyelenggaraan penanganan bencana pada tahap pra-bencana sangatlah penting karena upaya yang dilakukan sangatlah pengaruh terhadap pengurangan resiko bencana. Tidak kecuali pada tahap kesiapsiagaan, itu sendiri berarti mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana. Mampu mencegah bencana, jika mungkin. Jika tidak, mampu mengurangi dampaknya. Jika ada bencana, dapat menanggulangi secara efektif. Setelah bencana terjadi, mampu pulih kembali.

Dalam konteks bencana banjir yang terjadi di Desa Wonoasri, peneliti memaparkan apa yang menjadi kegiatan pada Tahap Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember untuk upaya penyelenggaraan penanganan bencana. Selanjutnya peneliti mengkroscek hasil dilapangan yang merupakan studi kasus pada penelitian ini.

Dilihat dari sisi penilaian resiko bencana dalam kegiatan ini yang seharusnya dilakukan oleh BPBD tahap kesiapsiagaan melakukan analisis resiko bencana, menentukan tingkat resiko, membuat peta resiko bencana. Demikian apayang dipaparkan oleh Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Tahap Pencegahan dan Kesiapasiagaan.

“Dalam masalah bencana banjir yang ada di desa wonoasri, bukan berarti kami mekesampingkan melaikan tingkat yang paling rentan ialah masalah soal korban jiwa. Dari data BNPB kajian yang sudah di terima menjadi rujukan program BPBD adalah masalah tsunami di daerah Kecamatan Tempurejo dan yang lain. Selama ini untuk bencana banjir yang ada di desa wonoasri yang kejadiannya tiap tahun. Kami hanya menganalisis data yang ada dari profil desa dan sejarah desa tersebut yang pada saat itu terjadi pada fokus tahun 2013 dan pada tahun 2014 baru ada realisasi. Untuk pembuatan peta rawan bencana sudah menjadi ingklut dari peta rawan bencana Kabupaten Jember.”(sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Sedikit berbeda dari apa yang di paparkan oleh Bapak Sugeng selaku Kepala Desa Wonoasri saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang penilai resiko bencana.

“Untuk penilai resiko bencana maupun soal peta rawan bencana selama saya menjabat menjadi kepala desa maupun sebelum saya menjabat hal itu belum saya dengar. Tapi memang adanya realisasi soal penyelesaian Pembuatan tanggul dam dan penyudetan memang hal tersebut dilakukan pada tahun 2014. Prosesnya juga dibantu oleh lembaga instansi yang lain.”(sumber: Wawancara, Senin 22 Juni 2015 jam 10.43)

Dari hasil wawancara kepada 2 (dua) informan ini dapat disimpulkan bahwa, dalam penilai resiko bencana yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahap Kesiapsiagaan kurang diperhatikan. Masalahnya pada proses penerapan ini hanya mengadakan soal bahan kajian yang sudah dibuat.

Dilihat dari Perencanaan Siaga (*contingency palnning*) Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Pahap Pecegahan dan Kesiapsiagaan. Membuat pernyataan tentang menyusun kebijakan penanganan, mengkaji kebutuhan, inventarisasi sumber daya, membuat perencanaan setiap sektor.

“Dalam perencanaan siaga selama kurun waktu 2 tahun BPBD terbentuk, kami menyusun kebijakan penanganan saat bencana itu setelah menganalisis tingkat hazard yang terjadi. Selama banjir yang terjadi di Wonoasri kami sudah menganalisis sebelumnya lah..setelah itu kami berusaha mengkaji kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.” (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Bapak sugeng juga menanggapi pernyataan soal perencanaan siaga yang dilakukan oleh lembaga.

“Rencana siaga yang dilakukan oleh lembaga baik itu BNPB atau TNI dan BASARNAR sangat membantu.Karena apa yang sudah dilakukan lembaga dalam mengurangi resiko bencana banjir.”(sumber: Wawancara, Senin 22 Juni 2015 jam 10.43)

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa tindak lanjut dari sebuah perencanaan siaga yang dilakukan oleh BPBD kabupaten jember khususnya pada pra-bencana dan tahap kesiapsiagaan berlangsung baik. Karena dengan apa yang lembaga rencanakan setelah beberapa kali melihat sejarah tentang rawan bencana yang terjadi di daerah akan berpengaruh penting dalam proses penanggulangan bencana.

Dilihat dari mobilisasi sumberdaya, yang dimana identifikasi sumberdaya yang tersedia dan siap digunakan.Identifikasi sumberdaya dari luar yang dapat di mobilisasi untuk keperluan darurat. Tahap Kesiapsiagaan “Menggunakan apa yang sudah ada dalam penyiapan sumberdaya BPBD Kabupaten Jember”(sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35) kata Bapak Rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam masalah koordinasi untuk kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh tahap Kesiapsiagaan dalam Penanganan bencana banjir di desa wonoasri Bapak rizal mengutarakan sebagai berikut.

“Untuk masalah bencana banjir yang terjadi di Desa Wonoasri, sistem koordinasinya melalui aparat desa setempat. Karena desa setempatlah lebih awal mengetahui. Selama 24 jam kami selalu stanbay ketika hujan tiada henti di wilayah tersebut. (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Hal ini senada yang diungkapkan Bapak Sugeng Priyadi, selaku kepala Desa Wonoasri.

“ya benar dek..dalam masalah koordinasi, Desa mempunyai 3 pilar yang dari situlah ketika hujan turun secara terus menerus selama 24 jam kami melaporkan ke atas. Penanganan selanjutnya kami limpahkan kepada lembaga terkait dengan bantuan masyarakat tentunya.”(sumber: Wawancara, Senin 22 Juni 2015 jam 10.43)

Dari pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem koordinasi yang baik akan dapat menghasilkan apa yang tujuan penanganan bencana selanjutnya. Meskipun hal ini terjadi pada saat kedaruratan. Dalam sistem koordinasi tidak hanya dilakukan pada lembaga terkait saja, melainkan koordinasi dengan lembaga lain juga perlu diperhitungkan karena ruang lingkup bencana tidak hanya pada lembaga saja tapi menjadi kesatuan.

Dilihat dari Mekanisme Respon dalam menyiapkan posko, menyiapkan tim reaksi cepat, mempunyai prosedur tetap, menentukan incident commander, melakukan upaya penanganan di luar prosedur rutin. Bapak rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sudah menanggapi sebelumnya, hal yang sama juga di berlakukan pada masalah banjir yang terjadi di Desa Wonoasri. Hal tersebut peneliti mengkoscek ke Bapak Sugeng Priyadi selaku Kepala Desa Wonoasri. Dan beliau menjawab.

“Kalau penanggulangan bencana darurat itu cepat, itu tidak hanya BPBD tapi TNI, POLRI semua terjun ke bawah di saat penanggulangan itu reaksi cepat memang, semua kerjasama sama secara menyeluruh.”(sumber: Wawancara, Senin 22 Juni 2015 jam 10.43)

Ditinjau dari kegiatan Peringatan Dini (*early warning*) yang dimana sebuah tindakan yang dilakukan agar supaya masyarakat atau warga sekitar dapat melakukan sebuah tindakan sebelum bencana itu terjadi. hal itu dilakukan agar penyampaian informasi yang tepat waktu dan efektif. Kemudian Bapak Rizal mengatakan.

“Sistem Peringatan dini (EWS) kami lakukan saat mengetahui dari BMKG bahwasannya akan terjadi hujan lebat pada daerah sekitar. Dan kami selalu memantau akan hal itu selama 24 jam.” (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Berbeda dengan pernyataan Bapak Sugeng saat menanggapi peringatan dini yang dilakukan oleh lembaga terkait. Beliau menjawab.

“Selama yang saya ketahui hal itu jarang dilakukan. artinya informasi penanggulangan itu dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan itu sendiri (aparatur desa). Disitu juga masyarakat yang hafal, kalau hujan 1 kali 24 jam tidak berhenti masyarakat dengan sendirinya menggungsi. Baru pemerintah itu sendiri yang ngebel ke instansi.”(sumber: Wawancara, Senin 22 Juni 2015 jam 10.43)

Dari sini dapat disimpulkan manajemen peringatan dini yang dilakukan oleh BPBD kurang maksimal. Disisi lain proses pencegahan dan informasi yang akurat dan efisien tersebut dirasa sulit. Karena disitu adanya ketidakpahaman yang bisa saja mempengaruhi masyarakat. Kendalanya juga masyarakat yang sudah terbiasa akan bencana banjir.

Dalam pembahasan Manajemen informasi dari hasil yang diperoleh peneliti kegiatan ini dilakukan bukan hanya konteks kasus banjir yang terjadi di Desa Wonoasri melainkan bersifat menyeluruh kepada masyarakat agar dapat mengetahui secara gamblang peran yang dilakukan BPBD dalam proses

penyelenggaraan penanggulangan bencana alam. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak rizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada wawancara sebelumnya.

Dan yang terakhir dilihat dari kegiatan Gladi/Simulasi (*drilling/simulation*) dilakukan agar masyarakat tahu akan pentingnya penanggulangan bencana. Harapannya agar supaya masyarakat siap akan bencana itu sendiri. Proses kegiatanyapun dilakukan secara berkala dan secara rutin. Ketika peneliti wawancara soal gladi yang dilakukan BPBD khususnya tahap kesiapsiagaan untuk masalah banjir yang ada di Desa Wonoasri Bapak Rizal menjawab.

“untuk gladi/Simulasi dilakukan menurut analisis kajian yang sudah dibuat. Selama ini sejak berdirinya BPBD kabupaten Jember hanya beberapa daerah yang sudah mengalami sosialisasi tentang penanggulangan bencana. Harapannya pada lima tahun kedepan kami bisa melakukan secara keseluruhan sampai tingkat desa.” (sumber: Wawancara, Jum’at 19 Juni 2015 jam 15.35)

Begitu pula yang di katakan oleh Bapak Sugeng Priyadi setelah peneliti mempertanyakan tentang masalah gladi/simulasi yang beliau tahu selama ini.

“Gladi/simulasi itu pernah ada tapi melaikan bukan dari BPBD secara langsung. Tapi hal itu seharusnya hal itu sampai terjun kelapangan juga karena hal tesebut penting bagi masyarakat,selama ini hanya sekedar sosialisasi saja.”(sumber: Wawancara, Senin 22 Juni 2015 jam 10.43)

Dari proses wawancara kepada 2(dua) informan diatas mengenai gladi atau simulasi peneliti mendapat kesimpulan kurangnya gladian atas apa yang dilakukan BPBD Kabupaten Jember demi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sehatusnya gladi/simulasi itu dilakukan keseluruh kalangan masyarakat karena tidak banyak orang mengerti akan konteks bencana itu sendiri.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka secara keseluruhan mengenai Peran BPBD dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Banjir Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pada proses penilaian resiko masalah banjir yang terjadi di desa wonoasri oleh BPBD Kabupaten Jember belum terlaksana sepenuhnya, di lihat dari sisi Identifikasi Ancaman, BPBD Kabupaten Jember seharusnya bisa menghitung seberapa besar ancaman jika terjadi banjir yang terjadi wonoasri. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap Identifikasi Kerentanan, karena ketika mengetahui Jenis Ancaman dan kerentanan akan menghasilkan sebuah analisis dan tingkat resiko bencana. Dilihat dari sisi membuat peta bencana memang BPBD membuat Peta Rawan Bencana untuk Kabupaten Jember berdasarkan jenis bahaya untuk masing daerah. Tapi peta yang menunjukan perpaduan antara bahaya dan kerentanan resiko banjir khususnya banjir yang terjadi di wonoasri tidak ada. Dimana yang seharusnya peta resiko dihasilkan mencakup juga peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Sedangkan dokumen memuat tingkat resiko bencana yang merupakan gabungan dari tingkat kerugian, tingkat bahaya dan tingkat kapasitas. Mekanisme penyusunan peta resiko bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen kajian resiko bencana.
2. Tindak lanjut dari sebuah perencanaan siaga yang dilakukan oleh BPBD kabupaten jember khususnya pada pra-bencana dan tahap kesiapsiagaan berlangsung baik. Karena dengan apa yang lembaga rencanakan setelah

beberapa kali melihat sejarah tentang rawan bencana yang terjadi di daerah akan berpengaruh penting dalam proses penanggulangan bencana.

3. Dalam mobilisasi Sumber Daya studi Banjir yang terjadi di Desa Wonoasri Tahap Kesiapsiagaan tidak melakukan identifikasi ketersediaan dan pembagian sumber daya hal tersebut tidak dilakukan sama sekali langkah dari awal identifikasi sampai dengan peran setiap sektor yang dimana mobilisasi sumber daya berguna akan nantinya berlangsungnya ketika bencana itu berlangsung. Tahap Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember hanya bertumpuh pada SATGAS (satuan tugas) dalam mengerakkan sumber daya saat bencana berlangsung.
4. Pendidikan dan Pelatihan soal banjir Desa Wonoasri BPBD Kabupaten Jember khususnya Tahap Kesiapsiagaan tidak terlaksana karena rencana kontijensi saat awal berdirinya BPBD masih menitik beratkan pada Hazard dari resiko paling bahaya pada saat terjadinya bencana yaitu bencana gunung berapi Raung. Sedangkan untuk masalah banjir belum ada tentang rencana kontijensi.
5. Koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember Tahap Kesiapsiagaan hanya bersifat kondisional yang dimana koordinasi dengan BMKG melalui media elektronik. PRB (Pengurangan Resiko Bencana) dibentuk tidak ditujukan oleh Bencana Banjir yang terjadi melainkan bersifat keseluruhan. Disini dapat terlihat tahap kesiapsiagaan sistem koordinasi ketika bencana banjir tidak ada karena tidak adanya pembentukan forum koordinasi, yang ada hanya bentuk sosialisasi tentang forum PRB saja. Selama bencana banjir terjadi koordinasi yang dilakukan melalui masyarakat setempat, dimana sebelumnya mengetahui informasi dari BMKG dan melihat curah hujan.
6. Mekanisme respon BPBD Kabupaten Jember khususnya tahap kesiapsiagaan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kekurangannya adalah mekanisme respon tersebut dilakukan saat bencana berlangsung,

yang pada dasarnya kesiapsiagaan sendiri alangkah lebih baiknya dilakukan sebelum bencana banjir itu terjadi, dengan melihat sejarah resiko dari bencana banjir sebelumnya.

7. Peringatan Dini yang dilakukan oleh tahap kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember kurang berjalan secara baik, karena pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat kurang terkoordinasi secara baik. Pada kenyataannya bencana banjir yang di Desa Wonoasri masih berdampak kerugian materiel saat bencana melanda hal ini terjadi karena sosialisasi tentang sistem peringatan dini sampai ke tingkat desa kurang berjalan secara maksimal. Perumusan sistem dan mekanisme serta Analisa dan pembuatan draf dokumen sistem peringatan dini juga belum terbuat hal ini mengakibatkan hal serupa akan terulang kembali ketika ketidaksiapan sebuah peringatan dini kepada masyarakat.
8. Menejemen informasi dilakukan bukan hanya konteks kasus bencana banjir yang terjadi di Desa Wonoasri melainkan bersifat menyeluruh kepada masyarakat agar dapat mengetahui secara gamblang peran yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Jember.
9. Gladi/Simulasi terhadap bencana banjir yang terjadi di Desa Wonoasri tidak dilakukan oleh BPBD Tahap Kesiapsiagaan hal itu sangat disayangkan karena melihat Desa Wonoasri termasuk daerah langganan banjir. Gladi/simulasi diadakan mulai dari sebuah kajian, dokumen RPB, Strategi penanganan skenario, Rencon.Renopdan hasilnya adala simulasi. Melihat hal tersebut kajian tentang masalah banjir belum dilaksanakan sama sekali, karena selama terbentuknya BPBD Kabupaten Jember kajian dan rencana kontijensi dipusatkan pada penanganan bencana Gunung berapi, yang dimaksud adalah Gunung Raung.
10. Peran BPBD Kabupaten Jember Pada tahun 2014 melakukan proses pencegahan terkait adanya banjir yang terjadi di Desa Wonoasri

Kecamatan Tempurejo. Yaitu sudetan pada salah satu sungai yang menyebabkan banjir mengenai seperempat desa wonoasri. Kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa instansi/lembaga terkait termasuk Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Hal itu dilakukan bahwasanya ada salah satu sungai yang tersumbat karena endapan lumpur yang berlebih menyebabkan banjir secara terus menerus terjadi.

11. Pada tahap kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dilakukan melihat Rencon (Rencana Cotijensi), yang dimana masih menggunakan skala prioritas pada proses penanganannya. Hal ini dapat dilihat pada awal berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada akhir tahun 2012 sampai akhir 2014 belum adanya Kajian Tentang Pengurangan Resiko bencana banjir yang ada di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo. Padahal banjir yang terjadi di Desa Wonoasri pada penyelenggaraan penanggulangan bencana proses pra-bencana Desa Wonoasri termasuk situasi terdapat potensi bencana.

5.2 Saran

1. BPBD Kabupaten Jember khususnya Tahap Kesiapsiagaan perlu sosialisasi akan paradigma baru kepada semua kalangan agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetapkebecanaan sampai ke tingkat pemerintah paling bawah dalam hali ini adalah Pemerintah Desa.
2. Secara umum, BPBD dalam proses penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berkelanjutan pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan dalam pelaksanaannya harus terkomando dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
3. Pelunya alokasi anggaran yang ideal dan jelas dalm mengatsi segala permasalahan penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

2013. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Jember: BPBD KabupatenJember.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana. Jakarta
- Henry, Nicholas. 2005. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Horton, Paul B. 1999. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Huberman, M & Miles, B. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- Kasiram, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif – Kualitatif*. Malang: UIN – Malang Press.
- Keban, Yeremias T, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Komarudin. 1994. *EsiklopediaManajemen*. Jakarta: BumiAksara.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Pramusinto, Agus. 2009. *Kepemimpinan dan Pelayanan Publik; Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Santoso, Pandji. 2009. *Administrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Revika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. 2006, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. Indonesia
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UPT Penerbitan UNEJ. 2006. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Internet

https://www.google.com.sg/?gfe_rd=cr&ei=Q8PMVYydN6yW8QfN27CQCQ#q=peran+pemerintah+dalam+penanggulangan+bencana

<http://www.ipdn.ac.id/purek1/wp-content/uploads/2013/10/a-Bab-I-Konsep-Organisasi.pdf>

https://www.google.com.sg/?gfe_rd=cr&ei=sejMVf_jB6uW8QfRy5GQCQ#q=KESIAPSIAGAAN+dan%0BMITIGASI+BENCANA+dalam+%0BUU+No.+24+Tahun+2007